



**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN SEKTOR
INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2016**

SKRIPSI

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentras ilmu Ekonomi*

Oleh:

AYU ANGGITA

NIM: 1440200005

OLEH :

AYU ANGGITA

NIM: 1440200005

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PADANGSIDIMPUAN

TAHUN 2018

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN SEKTOR
INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI SUMATERA UTARA
TAHUN 2007-2016**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelara Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ekonomi Syariah
Konsentrasi Ilmu Ekonomi*

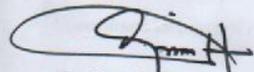
Oleh:

AYU ANGGITA

NIM. 14 402 00005

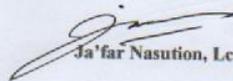
JURUSAN EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I



Dr. Darwis Harahap, S. HL., M.Si
NIP.19781808 200901 1 005

PEMBIMBING II



Ja'far Nasution, Lc, M.EI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. Ayu Anggita
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 7 Mei 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ayu Anggita yang berjudul "**Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Darwis Harahap, S.H.L., M.Si
NIP.19781808 200901 1 005

PEMBIMBING II

Ja'far Nasution, Lc, M.E.I

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AYU ANGGITA
NIM : 1440200005
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
JudulSkripsi : **Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 7 Mei 2018
Saya yang Menyatakan,



AYU ANGGITA
NIM : 1440200005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Anggita
NIM : 1440200005
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
JenisKarya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN SEKTOR INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-2016**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada tanggal : 7 Mei 2018
Yang menyatakan,



AYU ANGGITA
NIM. 144020005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : AYU ANGGITA
NIM : 14 402 00005
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor Industri Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016

Ketua

Dr. Darwis Harahap, S. HL., M.Si
NIP. 19781808 200901 1 005

Sekretaris

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Anggota

Dr. Darwis Harahap, S. HL., M.Si
NIP. 19781808 200901 1 005

Delima Sari Lubis, M.A
NIP. 19840512 201403 2 002

Windari, S.E., M.A
NIP. 19830501 201503 2 003

Utari Evy Cahyani, S. P., M.M
NIP. 19870521 201503 2 004

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpun
Hari/Tanggal : Kamis/07 Juni 2018
Pukul : 09.30 s/d 12.00 WIB
Hasil/Nilai : 76,75 (B)
Predikat : Cumlaude
IPK : 3,76



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan22733
Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

Pengesahan
PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAN SEKTOR
INDUSTRI TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI DI SUMATERA UTARA TAHUN 2007-
2016**

NAMA : AYU ANGGITA
NIM : 1440200005

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidimpuan, 13 Juli 2018



Dr. Darwis Harahap, S.HL., M.Si
NIP. 19781808 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : AYU ANGGITA

NIM : 14 402 00005

**Judul : Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor Industri terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara Tahun 2007-2016**

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu wilayah dan dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Salah satu *instrument* yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi makro untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui kendali belanja pemerintah dan perpajakan. Besarnya pajak yang diterima pemerintah belum tentu bisa memperbaiki keadaan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya rendahnya pajak yang diterima pemerintah dari pemotongan pajak belum tentu bisa memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. dan perhatian terhadap sektor industri juga perlu dilakukan karena sektor industri dikenal dengan *leading sector* yang dapat memacu dan mendorong sektor-sektor lain untuk kemajuan ekonomi. Rumusan penelitian ini adalah apakah ada pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016 baik secara parsial maupun secara simultan.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan penerimaan pajak, sektor industri dan pertumbuhan ekonomi. Sehubungan dengan itu, kajian yang dilakukan dihubungkan dengan teori-teori yang berkaitan dengan variabel tersebut.

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder gabungan *time series* dan *cross section* atau data panel mulai tahun 2007-2016 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. Model Estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect* dengan menggunakan variabel *dummy* yaitu penerimaan pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan program komputer *eviews versi 9*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel penerimaan pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) karena diperoleh nilai $t_{hitung} 6,773951 > t_{tabel} 2,01063$. Variabel sektori industri (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) karena diperoleh nilai $t_{hitung} 0,502692 < t_{tabel} 2,01063$. Secara simultan penerimaan pajak dan sektor industri berpengaruh secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi karena diperoleh nilai $F_{hitung} 34,41625 > F_{tabel} 4,04$.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam peneliti sanjung tinggikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat kelak.

Untuk menyelesaikan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Skripsi ini dengan judul: **“Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016”**

Dalam menyusun skripsi ini peneliti banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun immaterial, akhirnya skripsi ini dapat di selesaikan. Oleh sebab itu peneliti mengucapkan banyak terimakasih utamanya kepada:

1. Ayahanda tercinta Irwan Ansari Siregar dan Ibunda tercinta Saibah Rumonda Pasaribu yang telah membimbing dan selalu berdoa yang tiada henti-hentinya, serta berjuang demi kami anak-anaknya hingga bisa menjadi apa yang di harapkan. Terimakasih doa dari Abang serta Adik saya (Bani Perdana, Algi Fari, Aviv Perwira dan Ali Pazri) yang paling berjasa dalam hidup Peneliti yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moral dan material demi kesuksesan Peneliti. Do'a dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga

Allah senantiasa dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M.A, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser, M.Si wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs. Kamaluddin , M.Ag wakil Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
4. Ibu Delima Sari Lubis S.E., M.S sebagai Ketua Prodi Jurusan Ekonomi Syariah serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
5. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si, sebagai dosen pembimbing I, saya ucapkan banyak terimakasih yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bantuan, semangat, bimbingan dan pengarahan dalam penelitian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah bapak berikan.
6. Bapak Ja'far Nasution, Lc, M.E.I sebagai dosen pembimbing II, saya ucapkan banyak terimakasih, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan yang telah Bapak berikan.
7. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
9. Serta teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya ES I (IE). Terutama untuk sahabat-sahabat saya, Siti Holija, Rosnita Rambe, Maulina Daulay, dan Juraida Nasution yang telah memberikan dukungan serta bantuan, semangat dan doa kepada peneliti agar tak berputus asa dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan terima kasih juga untuk persahabatan dan diskusinya selama ini serta pihak-pihak yang tidak dapat saya tulis satu persatu yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan ilmu yang dimiliki peneliti serta kemampuan peneliti yang jauh dari cukup. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi dan melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Padangsidimpuan, Mei 2018

Peneliti,

AYU ANGGITA
NIM. 14402 00005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa latin.

Penulisan transliterasi 'Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
--- َ ---	Fathah	a	a
---- ِ --	Kasrah	i	i
-- ُ ---	Dammah	u	u

Contoh:

كتب	→	<i>kataba</i>	يذهب	→	<i>yadzhabu</i>
سئل	→	<i>su'ila</i>	كرذ	→	<i>kuridza</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ىـ َ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وـ َ ---	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف	→	<i>kaifa</i>	هول	→	<i>hauila</i>
-----	---	--------------	-----	---	---------------

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

- a. *Fathah* + huruf *alif*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

رَجَالٌ → *rijālun*

- b. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a dengan garis di atas, seperti:

مُوسَى → *mūsā*

- c. *Kasrah* + huruf *ya' mati*, ditulis = i dengan garis di atas, seperti:

مُجِيبٌ → *mujībun*

- d. *Dammah* + huruf *wawu mati*, ditulis = u dengan garis di atas, seperti:

قُلُوبُهُمْ → *qulūbuhum*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

- a. *Ta' Marbutah* hidup atau yang mendapat harakah *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

- b. *Ta' Marbutah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”

Contoh: طَلْحَةٌ → *Talhah*

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ → *Raudah al-jannah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh: رَبَّنَا → *rabbana* نَعَم → *na'ima*

6. Penulisan Huruf *Alif Lam*

a. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maupun *qomariyah* ditulis dengan metode yang sama yaitu tetapi ditulis *al-*, seperti:

الكريم الكبير → *al-karīm al-kabīr*

b. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf capital, seperti :

العزیز الحكيم → *al-Azīz al-hakīm*

c. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين → *Yuhib al-Muhsinīn*

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء → *syai'un* أمرت → *umirtu*

8. Penulisan Kata atau Kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata sekata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين → *Wa innallāha lahuwa khairu al-Rāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول → *wamā Muhammadun illā Rasūl*

10. Kata yang sudah bahasa Arab yang sudah masuk bahasa Indonesia maka kata tersebut ditulis sebagaimana yang biasa ditulis dalam bahasa Indonesia. Seperti kata: al-Qur'an, hadis, ruh, dan kata-kata yang lain. Selama kata-kata tersebut tidak untuk menulis kata bahasa Arab dalam huruf Latin.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Definisi Operasional Variabel	13
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan Penelitian	14
G. Kegunaan Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	17
1. Pertumbuhan Ekonomi	17
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	17
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi	18
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi	22
d. Pertumbuhan Ekonomi Islam.....	25
2. Penerimaan Pajak	28
a. Pengertian Pajak	28
b. Karakteristik dan Unsur pajak	29
c. Jenis-Jenis Pajak	29
d. Fungsi Pajak.....	37
e. Pajak Menurut Syariah	39

3. Sektor Industri	43
a. Pengertian Industri	43
b. Argumentasi Industrialisasi	46
c. Strategi Industrialisasi	47
d. Klasifikasi Industri	48
e. Keterkaitan Industri	50
f. Industri dalam Pandangan Islam	51
B. Penelitian Terdahulu.....	54
C. Kerangka Pikir	58
D. Hipotesis.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	63
B. Jenis Penelitian	63
C. Populasi dan Sampel	64
1. Populasi	64
2. Sampel	64
D. Jenis dan Sumber Data.....	65
E. Teknik Analisis Data.....	65
1. Model Estimasi Data Panel	66
a. <i>Common Effect</i>	66
b. <i>Fixed Effect</i>	66
c. <i>Random Effect</i>	67
2. Uji Pemilihan Model Estimasi Data Panel.....	67
a. <i>Ujichow</i>	67
b. <i>Ujihausman</i>	67
c. <i>Ujilagrange multiplier</i>	68
3. Uji Asumsi Klasik	68
a. Uji Normalitas.....	68
b. Uji <i>Multikolinieritas</i>	68
c. Uji <i>Heterokedastisitas</i>	68
d. Uji <i>Autokorelasi</i>	69
4. Uji Hipotesis	69
a. Uji Parsial (Uji t).....	69
b. Uji Simultan (Uji F).....	70
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	70
6. Analisis Regresi Berganda	70

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	73
1. Kabupaten Asahan.....	75
2. Kabupaten Simalungun	77
3. Kabupaten Deliserdang	79

4. Kabupaten Langkat.....	81
5. Kota Medan.....	82
B. Hasil Estimasi.....	85
1. Model Estimasi Data Panel	85
2. Uji Pemilihan Model Estimasi Data Panel	86
a. Uji <i>Chow</i>	86
b. Uji <i>Hausman</i>	87
3. Uji Asumsi Klasik	88
a. Uji Normalitas.....	89
b. Uji <i>Heterokedastisitas</i>	89
c. Uji <i>Multikolinearitas</i>	90
4. Uji Hipotesis	91
c. Uji Parsial (Uji t).....	91
d. Uji Simultan (Uji F).....	93
5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	94
6. Uji Regresi Berganda.....	95
C. Pembahasan Hasil Penelitian	97
D. Keterbatasan Penelitian.....	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Laju pertumbuhan ekonomi, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Sumalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan tahun 2012-2016 (Pesen).....	4
Tabel 1.2	Penerimaan pajak, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Sumalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan tahun 2012-2016 (Pesen)...	7
Tabel 1.3	Nilai tambah industri, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Sumalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan tahun 2012-2016 (Pesen)	11
Tabel 1.4	Definisi Operasional Variabel	13
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	55
Tabel 2.2	Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu.....	57
Tabel 3.1	Kriteria pemilihan sampel.....	65
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota & Pusan Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara	74
Tabel 4.2	PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Asahan Tahun 2007-2016	76
Tabel 4.3	PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Simalungun Tahun 2007-2016	78
Tabel 4.4	PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007-2016	80
Tabel 4.5	PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Langkat Tahun 2007-2016	82
Tabel 4.6	PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kota Medan Tahun 2007-2016	84
Tabel 4.7	Hasil estimasi <i>Common Effect</i> , <i>Fixed Effect</i> , dan <i>Random Effect</i>	85
Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Chow</i>	86
Tabel 4.9	Hasil Uji Hausman	87
Tabel 4.10	Hasil Uji Park	90
Tabel 4.11	Hasil Uji Multikolinearitas	90
Tabel 4.12	Hasil Uji t	92
Tabel 4.13	Hasil Uji F	94
Tabel 4.14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	95
Tabel 4.15	Hasil Uji Estimasi <i>Fixed Effect</i>	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 KerangkaPikir	60
Gambar 3.1 Kerangka Model Regresi	72
Gambar 4.1 Uji Normalitas	89

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan melalui pajak dan Nilai tambah industri di Sumatera Utara tahun 2012-2016 (Persen)	2
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Data Observasi
- Lampiran 2 *Output* Model Estimasi
- Lampiran 3 *Output* Uji Asumsi Klasik
- Lampiran 4 *Output* Uji t, Uji F, dan Uji R^2
- Lampiran 5 *Output* Regresi Berganda
- Lampiran 6 Titik Persentase Distribusi Chi-Square untuk d.f=1-50
- Lampiran 7 Titik Persentase Distribusi t
- Lampiran 8 Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilitas = 0,05

BAB I

PENDAHULUAN

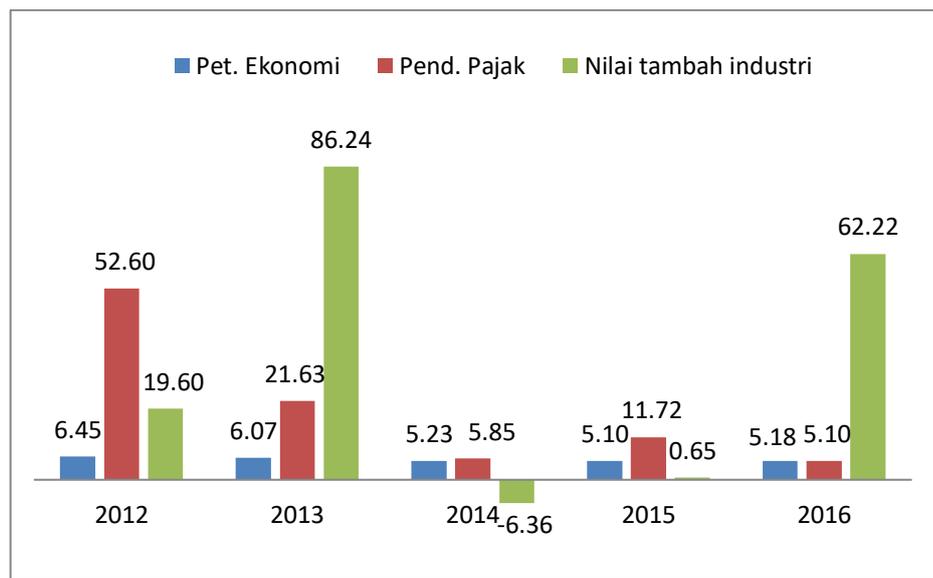
A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa terakhir ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas (mentah), sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah, dan yang perlu menyebabkan efek *multiplier* dalam perekonomian.

Provinsi Sumatera Utara memiliki peran penting bagi perekonomian wilayah dan nasional, terutama melalui peran industri makanan dan minuman, industri logam, dan sektor perkebunan kelapa sawit, kopi dan kakao. Sumatera Utara juga merupakan penghasil pangan terbesar di luar Jawa untuk komoditas padi dan jagung, selain itu pajak daerah merupakan salah satu penerimaan di Dinas Pendapatan Sumatera Utara, oleh karena itu perlu suatu anggaran atau rencana penerimaan dari pajak daerah. Upaya peningkatan pajak daerah belum mampu meningkatkan pendapatan daerah sesuai dengan target yang diharapkan. Berikut diagram laju pertumbuhan

ekonomi, pendapatan melalui pajak dan nilai tambah industri Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2012-2016 (Persen).

Diagram. 1.1
Laju Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan melalui pajak dan nilai tambah industri di Sumatera Utara Tahun 2012-2016 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Berdasarkan diagram 1.1 di atas, laju pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan nilai tambah industri tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding, pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi meningkat 6,45 persen, penerimaan pajak meningkat cukup tinggi 52, 60 persen, dan nilai tambah industri 19,60 persen. Sedangkan pada tahun 2013 nilai tambah industri yang menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu 86, 24 persen, penerimaan pajak sebesar 21,63 persen dan pertumbuhan ekonomi 6,07 persen. Tahun 2014 nilai tambah industri mengalami penurunan sebesar 6,36 persen. Tahun 2015 penerimaan pajak mengalami peningkatan yang tinggi yaitu 11,72

persen, terakhir tahun 2016 nilai tambah industri mengalami peningkatan lagi sebesar 62,22 persen.

Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang industri, perkembangan dan penambahan produksi barang modal. Untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil.¹ Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.²

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik. Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi itu adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.³

Menurut Solow-Swan dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah jumlah

¹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 423.

²*Ibid.*, hlm. 9.

³Michael P. Todaro & Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*, Diterjemahkan dari "Economic Development" oleh Haris Munandar (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 99.

penduduk.⁴ Berdasarkan sensus penduduk 2010 di Sumatera Utara, terdapat lima daerah yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5 persen ke atas yaitu Kabupaten Asahan (5,19 persen), Kabupaten Simalungun (6,30 persen), Kabupaten Deli Serdang (13,91 persen), Kabupaten Langkat (7,52 persen) dan Kota Medan (15,93 persen), kelima daerah ini termasuk daerah yang memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian Sumatera Utara, baik dilihat dari segi penerimaan pajaknya maupun sumbangan sektor industrinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara. Berikut tabel laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun 2012-2016 (persen).

Tabel 1.1
Laju pertumbuhan ekonomi, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun 2012-2016 (persen).

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Asahan	30,93	5,71	5,88	5,57	5,64
Simalungun	644,15	52,54	53,29	52,36	53,97
Deli Serdang	5,29	9,22	7,5	5,24	5,32
Langkat	6,61	5,61	5,12	5,03	4,98
Medan	12,52	5,36	6,07	5,74	6,27

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Kabupaten Simalungun sebesar 644,15 persen dan terendah berada pada Kabupaten Deli serdang sebesar 5,29 persen. Tahun

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 88.

2013 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan di setiap daerah, kemudian tahun 2014-2016 menunjukkan keadaan yang stabil.

Menurut para ahli, banyak faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mulai dari sumber daya ekonomi dan sumber daya non ekonomi yang di dalamnya termasuk kebijakan pemerintah.⁵ Salah satu instrument yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi makro untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui kendali belanja pemerintah dan perpajakan. Pembiayaan pembangunan yang paling besar saat ini adalah melalui penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap perekonomian negara. Jika tujuan tersebut adalah mengoptimalkan tingkat produksi, kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dapat dengan mengenakan pajak tak langsung. Sebaliknya jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan penghasilan, pajak langsung yang progresif lebih tepat untuk diterapkan.⁶

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis pembelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pembiayaan anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu

⁵ Jainuddi Zakaria, *Pengantar Toeri Ekonomi Makro* (Jakarta: Gaung Persada Pres, 2009), hlm. 69

⁶Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta : Kencana, 2012), hlm. 38.

mencari dana. Dana tersebut terutama di peroleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan.⁷

Menurut Sadono Sukirno salah satu kebijakan untuk mempercepat proses pembangunan adalah meningkatkan tabungan pemerintah, tingkat tabungan pemerintah hanya akan bertambah bila tingkat penambahan penerimaan pemerintah lebih besar dari tingkat pengeluaran. Kebijakan meningkatkan pendapatan pemerintah dapat dilaksanakan dengan mencari sumber penerimaan pajak yang baru dan memperbaiki administrasi pungutan pajak.⁸

Menurut Wayan Sudirman penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jumlah pajak yang diterima oleh pemerintah digunakan untuk pembangunan ekonomi secara makro sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan menjadi meningkat.⁹

Berikut tabel persentase penerimaan pajak di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun 2012-2016 (persen)

⁷Sadono sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 153.

⁸ *Ibid.*, hlm. 155.

⁹ Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori dan Empirikal* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4-5.

Tabel 1.2
Penerimaan pajak, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun
2012-2016 (persen).

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Asahan	10,59	89,84	9,27	10,9	37,42
Simalungun	90,78	-40,04	7,7	143,65	-37,42
Deli Serdang	26,94	13,98	14,79	10,62	5,2
Langkat	69,88	-12,31	34,68	11,13	7,93
Medan	73,14	25,5	-1,9	7,01	5,35

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 1.2 untuk Kabupaten Asahan, penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan, persentase penerimaan pajak tertinggi berada pada tahun 2013 sebesar 89,84 persen, untuk Kabupaten Simalungun penerimaan pajak mengalami penurunan sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2013 dan 2016 masing-masing turun sebesar 40,04 persen dan 37,42 persen, persentase penerimaan pajak tertinggi berada pada tahun 2012 sebesar 90,78 persen, untuk Kabupaten Deli Serdang penerimaan pajaknya selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, Kabupaten Langkat mengalami penurunan di tahun 2013 sebesar 12,31 persen dan Kota Medan juga mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 1,9 persen.

Besarnya pajak yang diterima pemerintah belum tentu bisa memperbaiki keadaan ekonomi maupun pembangunan ekonomi, begitu pula sebaliknya rendahnya pajak yang diterima pemerintah dari pemotongan pajak belum tentu bisa memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Menurut pandangan tradisional mengenai pemotongan pajak yaitu akan memiliki dampak terhadap perekonomian. Dampak langsung dari pemotongan

pajak adalah mendorong pengeluaran konsumen. Pengeluaran konsumen yang lebih tinggi mempengaruhi perekonomian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, pengeluaran konsumen yang lebih tinggi akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa, dan dengan demikian meningkatkan *output* serta kesempatan kerja. Dalam jangka panjang, mengecilnya tabungan nasional yang disebabkan oleh pemotongan pajak akan berarti persediaan modal yang lebih kecil dan utang luar negeri yang lebih besar.¹⁰

Proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi. Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Dengan kata lain pembangunan ekonomi tidak lagi menggunakan *Gross Domestic Product* (GDP) sebagai sasaran pembangunan, tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas proses pembangunan.¹¹

Salah satu aktor dan pelaku ekonomi yang berperan dalam penggerak roda perekonomian suatu negara adalah kelompok bisnis seperti perusahaan dan industri yang menghasilkan produk-produk nasional. Kelompok bisnis ini adalah aktor atau pelaku kegiatan ekonomi publik yang menciptakan nilai tambah (*added value*) di tengah masyarakat, seperti membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat konsumen (domestik maupun asing), membayar pajak dan retribusi kepada

¹⁰ Gregory Mankiw, *Makro Ekonomi* Terjemahan dari “Macroeconomic” Oleh Fitria Liza dkk, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 429-430.

¹¹Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 5.

negara (sebagai sumber utama keuangan negara).¹² Jadi semakin banyak jumlah industri dalam suatu negara akan semakin bagus tingkat perekonomiannya akibat nilai tambah yang dihasilkan, karena suatu negara dikatakan makmur bukan diukur dari jumlah uang yang dimiliki melainkan dari tingkat produktifitas yang dimiliki.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Industri mempunyai peran sebagai sektor pemimpin, maksudnya dengan adanya pembangunan industri maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor pertanian dan jasa. Sebagai misal pertumbuhan sektor industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan-bahan baku bagi suatu industri. Dengan adanya industri tersebut memungkinkan juga berkembangnya sektor jasa.¹³ Produk-produk industrial selalu memiliki dasar tukar (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang lebih beragam dan mampu memberikan manfaat marginal kepada pemakainya.¹⁴

Sektor industri termasuk dalam salah satu sektor yang berkontribusi terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional serta

¹²Henri Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, (Padang: Akademia permata, 2013), hlm. 58.

¹³ Didit Purnomo, "Analisis Peran Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004," dalam *jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 9, No. 2, Desember 2008, hlm. 137-155.

¹⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 227.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (Provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan dari seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.¹⁵

Pada tahun 2013 sektor industri menjadi kontributor utama terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan peranannya sebesar 21,58 persen. Selanjutnya diikuti oleh sektor pertanian sebesar 21,32 persen dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 19,29 persen. Sementara itu sektor-sektor lainnya memberikan total kontribusi sebesar 37,81 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.¹⁶ Berikut tabel persentase nilai tambah industri di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun 2012-2016 (persen).

¹⁵Sumatera dalam Angka 2014/ Sumatera In Figure 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 543.

Tabel 1.3
Nilai tambah industri, di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun,
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan tahun
2012-2016 (persen).

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Asahan	16,69	-46,32	99,12	-28,22	549,07
Simalungun	-44,48	13,13	61,65	-39,75	296,81
Deliserdang	1,84	21,63	110,15	-63,51	696,77
Langkat	-3,16	-18,72	9,72	38,06	352,22
Medan	48,33	255,27	-35,78	-44,43	29,62

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, data diolah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas nilai tambah industri Kabupaten Asahan mengalami fluktuasi, tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan masing-masing 46,32 persen dan 28,22 persen, Kabupaten Simalungun juga mengalami penurunan di tahun 2012 dan tahun 2015 masing-masing 44,48 persen dan 39,75 persen, Kabupaten Deli Serdang hanya mengalami penurunan di tahun 2015 saja sebesar 63,51 persen, kabupaten Langkat mengalami penurunan berturut-turut tahun 2012 dan tahun 2013 penurunannya sebesar 3,16 persen dan 18,72 persen, Kota Medan juga mengalami penurunan berturut-turut di tahun 2014 dan 2015 sebesar 35,78 persen dan 44,43 persen. hanya kabupaten Langkat yang tidak mengalami penurunan nilai tambah industri di tahun 2015.

Dari berbagai teori-teori yang telah dipaparkan di atas peneliti tertarik ingin meneliti kebenaran tersebut apakah hal tersebut juga berlaku di Sumatera Utara dengan melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “ Pengaruh Penerimaan Pajak dan Sektor

Industri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, yang menjadi identifikasi masalah ialah:

1. Besarnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah belum tentu bisa memperbaiki keadaan ekonomi maupun pembangunan ekonomi.
2. Rendahnya penerimaan pajak yang diterima pemerintah dari pemotongan pajak belum tentu bisa memperbaiki pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
3. Nilai tambah industri di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan mengalami fluktuasi sementara pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, mengenai dampak dari penerimaan pajak dan nilai tambah industri yang berfluktuasi sementara pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan, peneliti meneliti pertumbuhan ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan sebagai variabel Y, penerimaan pajak sebagai variabel X1, sektor industri dilihat dari nilai tambah industri sebagai variabel X2, daerah penelitian dilakukan di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan yang dilihat dari jumlah penduduk yang mencapai 5 persen ke atas, dari tahun 2017-2016

D. Defenisi Oprasional Variabel

Tabel 1.4
Defenisis Oprasional Variabel

Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Penerimaan Pajak (X_1)	Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pajak Penghasilan (PPh) 2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 4. Bea Materai 5. Pajak Bumi dan Bangunan 	Rasio
Sektor Industri (X_2)	Sektor Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang yang bernilai lebih tinggi untuk penggunaannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai tambah 2. <i>Input</i> 3. <i>Output</i> 	Rasio
Pertumbuhan Ekonomi (Y)	Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan <i>output</i> perkapita dalam jangka panjang. Tekananya pada tiga aspek, yaitu Proses, <i>output</i> perkapita, dan jangka panjang.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk Domestik Regionl Bruto atas dasar harga konstan 2. Produk Domestik Regionl Bruto atas dasar harga berlaku 	Rasio

E. Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara?
2. Apakah terdapat pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara?
3. Apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara?

F. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam meneliti pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
2. Mengetahui pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.
3. Mengetahui pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

G. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti, untuk mengetahui apakah Penerimaan Pajak dan Sektor Industri berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara dan mengasah daya analisis peneliti dalam memecahkan masalah ekonomi.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga terkait dalam pembuatan

kebijakan yang berhubungan dengan penetapan pajak dan pembangunan industri di Sumatera Utara.

3. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.
4. Bagi Masyarakat, sebagai bahan kajian untuk menambah pengetahuan tentang Pajak, Sektor Industri dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada, maka peneliti menggunakan sistematika pembahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksud untuk penelitian laporan penelitian yang sistematis, jelas dan mudah dipahami. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

1. **Pendahuluan**, di dalamnya memuat tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam pendahuluan membahas tentang hal yang melatar belakangi suatu masalah untuk diteliti.
2. **Landasan Teori**, di dalamnya memuat tentang kerangka teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam landasan teori membahas tentang penjelasan-penjelasan mengenai variabel penelitian secara teori yang dijelaskan dalam kerangka teori.

3. **Metode Penelitian**, di dalamnya memuat tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data dan teknik analisis data. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam metode penelitian membahas tentang lokasi dan waktu penelitian serta jenis penelitian.
4. **Hasil Penelitian**, di dalamnya memuat tentang deskripsi daerah penelitian, hasil analisis penelitian dan pembahasan penelitian. Secara umum, mulai dari pendeskripsian daerah yang akan diteliti secara rinci, kemudian melakukan analisis data menggunakan teknik analisis data yang sudah dicantumkan dalam metode penelitian sehingga memperoleh hasil analisa yang akan dilakukan dan membahas tentang hasil yang telah diperoleh.
5. **Penutup**, di dalamnya memuat tentang kesimpulan dan saran. Secara umum, seluruh sub bahasan yang ada dalam penutup adalah membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini setelah menganalisis data dan memperoleh hasil dari penelitian ini. Hal ini merupakan langkah akhir dari penelitian dengan membuat kesimpulan dari penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.¹

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi. Menurut Adam Smith dalam teori pertumbuhan ekonomi klasik, untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang baik masyarakat diberi kebebasan seluas-luasnya

¹Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 9.

dalam menentukan kegiatan ekonomi, dimana pemerintah tidak perlu ikut campur dalam mengurus perekonomian, tugas pemerintah adalah menciptakan kondisi dan menyediakan fasilitas yang mendorong pihak swasta berperan optimal dalam perekonomian, sedangkan menurut pandangan Jhon Maynard Kenynes, untuk menjamin pertumbuhan yang stabil diperlukan peran pemerintah yang cukup besar yaitu pemerintah perlu menerapkan kebijakn fiskal (perpajakan dan perbelanjaan pemerintah), kebijakan moneter (tingkat suku bunga dan jumlah uang beredar), dan pengawasan langsung.²

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bidang penyelidikan yang sudah lama dibahas oleh ahli-ahli ekonomi. Mazhab Merkantalis, yaitu pemikir-pemikir ekonomi diantara akhir abad ke-16 dan akhir abad ke-17, banyak membahas peran perdagangan luar negeri terhadap pembangunan ekonomi. Dalam zaman ahli-ahli ekonomi Klasik lebih banyak lagi pendapat telah dikemukakan. Buku Adam Smith yang terkenal, yaitu *An Inquiry into the Nature and Causes of the Waelth Nation* atau dengan ringkas, *The Wealth of Nation*, pada hakikatnya adalah suatu analisis mengenai sebab-sebab dari berlakunya pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan. Sesudah masa Adam Smith, beberapa ahli ekonomi Klasik lainnya seperti Richardo, Maltus dan Stuar Mill

²Robinson Tarigan, *Ekonomi Regional* (Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005), hlm. 46-48.

juga menumpahkan perhatian yang besar terhadap masalah perkembangan ekonomi. Pada permulaan abad ini Schumpeter menjadi sangat terkenal karena bukunya mengenai pembangunan ekonomi. Yaitu buku yang berjudul *The Theory of Economic Development*, dan mengenai siklus kegiatan usaha, (*business cycle*) atau konjungtor. Setelah itu teori Harrod-Domar dan teori Neo-Klasik telah lebih memperkaya lagi analisis mengenai pertumbuhan ekonomi.

1) Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, ahli-ahli Klasik terutama menitik beratkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi, dan dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh penambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan.³

³ Sadono Sukirno, *Op, Cit.*, hlm. 433.

2) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan sesuatu barang, memperluas pasar sesuatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.⁴

Menurut Schumpeter, dengan adanya kemajuan-kemajuan ekonomi akan terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat yang akan menghapuskan peran pengusaha.⁵ Makin tinggi tingkat kemajuan sesuatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*sationary state*”. Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan pandangan Klasik. Seperti telah

⁴*Ibid.*, hlm. 434.

⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 254.

diterangkan, menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.⁶

3) Teori Harrod-Domar

Dalam menganalisis masalah pertumbuhan ekonomi, teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan berikut: (i) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal produksi (*capital output ratio*) tetap nilainya, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam analisisnya Harrod-Domar menunjukkan bahwa, walaupun pada suatu tahun tertentu (misalnya tahun 2002) barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, pengeluaran agregat dalam tahun 2002 yaitu $AE = C + I$, akan menyebabkan kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya (tahun 2003). Dengan perkataan lain, investasi akan berlaku dalam tahun 2002 akan menambah kapasitas barang modal untuk mengeluarkan barang dan jasa tahun 2003.

⁶Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm. 435.

4) Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Menurut teori pertumbuhan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Di mana:

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal.

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.⁷

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.⁸

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

1) Sumber Daya Manusia

Input tenaga kerja terdiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan tenaga kerja. Banyak ekonom meyakini bahwa kualitas *input* tenaga kerja, yaitu keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja, adalah satu-satunya unsur penting dalam pertumbuhan ekonomi.

⁷*Ibid.*, hlm. 437.

⁸*Ibid.*, hlm. 432-43.

2) Sumber Daya Alam

Sumber-sumber daya yang penting ini adalah tanah yang baik untuk ditanami minyak dan gas, hutan, air, dan mineral. Beberapa negara berpendapatan tinggi seperti Kanada dan Norwegia telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumber daya yang sangat besar dengan *output* besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan.

3) Pembentukan Modal

Modal nyata mencakup struktur-struktur seperti jalan dan pembangkit tenaga listrik, peralatan seperti truk dan komputer, dan persediaan barang. Barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefesienan pertumbuhan ekonomi. Di dalam masyarakat yang sangat kurang maju sekalipun barang-barang modal sangat besar perannya dalam kegiatan ekonomi.⁹

Contoh barang modal yang perlu untuk dibelanjakan pemerintah seperti, pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan pembiayaan anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana.

⁹*Ibid.*, hlm. 431.

Dana tersebut terutama di peroleh dari pungutan pajak ke atas rumah tangga dan perusahaan.¹⁰

Kebijakan pemungutan pajak tidaklah harus ditujukan khusus untuk menaikkan pendapatan pemerintah. di setiap negara pemungutan pajak mempunyai banyak tujuan, yaitu pemeratakan distribusi pendapatan, mengurangi tingkat konsumsi atas barang-barang tertentu, meningkatkan tabungan untuk penanaman modal dan mempengaruhi corak penanaman modal.¹¹

Penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak akan meningkatkan pendapatan pemerintah sebagai modal awal, sehingga pemerintah menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat adalah karena meningkatnya produksi nasional yang didorong oleh pemerintah.¹²

4) Perubahan Teknologi

Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk atau jasa baru. Penemuan proses yang sangat meningkatkan produktivitas adalah mesin uap, pembangkit listrik, antibiotik, mesin pembakaran, jet berbadan lebar, dan mesin faks.¹³

Apabila tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan , kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah dari pada yang

¹⁰*Ibid.*, hlm. 153.

¹¹ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Op, Cit.*, hlm. 314.

¹² Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter* (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 4

¹³ Samuelson dan Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, Diterjemahkan dari “*Macroeconomic*” Oleh Gretta dkk (New York: WcGraw-Hill, 2001), hlm. 250-252.

dicapai pada masa kini, tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap ada pada tingkat yang sangat rendah.¹⁴

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi adalah dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional kepada kegiatan ekonomi yang modern. Perubahan struktur ekonomi tersebut disebabkan oleh perubahan teknologi yang terus-menerus berlangsung.¹⁵

Di dalam persoalan ini langkah yang penting adalah mendorong perkembangan sektor manufaktur. Ekonomi yang semakin maju akan memerlukan berbagai jenis barang industri. Perkembangan ekonomi juga akan memerlukan barang konsumsi yang lebih banyak yang biasanya dihasilkan oleh sektor industri. Seterusnya sektor ini dapat didorong untuk mengekspor produksinya ke negara lain.¹⁶

d. Pertumbuhan Ekonomi Islam

Menurut pengamat ekonomi, pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan sebuah upaya untuk meningkatkan *level of income* masyarakat dan individu dalam jangka panjang, yang diiringi dengan meminimalisasi tingkat kemiskinan dan menghindari kerusakan distribusi kekayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi

¹⁴Sadono Sukirno, *Op, Cit.*, hlm. 431.

¹⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Op, Cit.*, hlm. 147.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 442

menuntut adanya penambahan kuantitas dan kualitas produksi dalam kegiatan ekonomi, serta adanya peningkatan modal dan tenaga kerja.

Dalam Islam, diperlukan norma ataupun etika yang berfungsi sebagai pijakan dalam menentukan langkah-langkah untuk mengatasi problematika ekonomi, serta upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang didapat tidak hanya berupa nilai-nilai materialisme, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan moral, dan nilai-nilai ruhiyah.¹⁷

Untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, tujuan dan fasilitas yang digunakan harus sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Walaupun demikian, hal tersebut tidak menafikan konsep dan sistem konvensional sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut Abdurrahman Yusro, pertumbuhan ekonomi dalam Islam telah digambarkan dalam Al-Qur'an:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai apa yang mereka kerjakan. (Q.S Al-A'raf : 96).¹⁸

¹⁷Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Diterjemahkan dari "Al- Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishaad fi al-Islam" Oleh Ahmad Ikhrom, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 138.

¹⁸Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, (Semarang: Raja Publisng, 2011), hlm. 167.

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن
 كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ
 بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezkinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka pakaian[841] kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.

Dari uraian di atas dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup akan kita raih selama kita rajin untuk melakukan *istighfar* (minta ampun). Allah menjanjika rezeki yang berlimpah kepada suatu kaum, jika kaum tersebut mau untuk bebas dari kemiskinan dan senantiasa berjalan pada nilai-nilai ketakwaan dan keimanan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan telah merajalela dan masyarakat tidak taat kepada Tuhannya, maka tidak akan diperoleh ketenangan dan stabilitas kehidupan.

Dalam Islam pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pertumbuhan ekonomi harus berlandaskan nilai-nilai iman, takwa dan konsistensi serta ketekunan untuk melepaskan segala nilai-nilai kemaksiatan dan perbuatan dosa. Hal tersebut tidak menafikan eksistensi usaha dan pemikiran untuk mengejar segala

ketertinggalan dan keterbelakangan yang disesuaikan dengan prinsip syar'iah.¹⁹

2. Penerimaan Pajak

a. Pengertian Pajak

Salah satu penerima pemerintah adalah pajak, definisi pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak progresif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak di mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.²⁰

Dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²¹

Rochmat Soemitro, mengatakan bahwa “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran”dapat dipaksakan” berarti bahwa bila hutang pajak itu tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita, dan juga penyenderaan.

¹⁹Said Sa'ad Marthon, *Op. Cit.*, hlm. 139-140

²⁰ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik Ed. Ke tiga*, (Yogyakarta: BPFE, 1995), hlm. 181

²¹ Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 86

Terhadap pembayar pajak itu tidak dapat ditunjukkan adanya jasa timbal tertentu seperti halnya di dalam retribusi.”²²

b. Karakteristik dan Unsur Pajak

Beberapa ciri atau karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:²³

- 1) Pajak dipungut berdasar adanya undang-undang ataupun peraturan pelaksanaannya;
- 2) Terhadap pembayaran pajak tidak ada kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- 3) Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang oleh karenanya kemudian muncul istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- 4) Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, yang apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *public investment*.

c. Jenis-jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan-kelompokkan dalam berbagai jenis dengan mempergunakan kriteria-kriteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari segi administratif yuridis, dari segi titik tolak pungutannya,

²² Sri Pudyatomoko, *Hukum Pajak*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005), hlm. 1-3.

²³ *Ibid.*, hlm. 5

berdasarkan sifatnya dan dapat pula dibedakan berdasarkan kewenangan pemungutannya.²⁴

1) Jenis pajak dari segi administratif yuridis

Penggolongan pajak dengan melihat dari sisi administratif yuridis akan menghasilkan apa yang sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tak langsung. Apa yang disebut sebagai pajak langsung maupun pajak tak langsung itu juga dapat dilihat dari segi yang lain, seperti dari sisi ekonomi.

a) Segi Yuridis: Sesuatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara periodik menurut kahir (nomor pajak) dan surat ketetapan pajak, di man pembebanan pajak tidak dapat dilimpahkan/dialihkan kepada pihak lain dan harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.²⁵ Sedangkan pajak tidak langsung dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang) dan tidak menggunakan kahir. Jadi pajak tak langsung hanya dipungut sesekali ketika *tatbestand* terpenuhi seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Undang-undang. Contoh pajak tak langsung adalah Bea Materai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa.

b) Segi Ekonomis: Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak tak langsung apabila beban pajak tidak dapat dilimpahkan kepada

²⁴*Ibid.*, hlm. 11-18.

²⁵Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.*, hlm.138.

pihak lain. Jadi dalam hal ini antara pihak yang dikenai kewajiban atau ditetapkan untuk membayar pajak dengan pihak yang benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang sama. Sedangkan pajak tak langsung adalah suatu jenis pajak di mana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai.²⁶

2) Jenis pajak berdasarkan titik tolak pungutannya

Pembedaan pajak berdasarkan titik tolak pungutannya ini menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subyektif dan pajak obyektif.

- a) Pajak subyektif: Adalah pajak yang pengenaannya berpangkal pada diri orang- badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subyektif dimulai dengan menetapkan orangnya baru kemudian dicari syarat-syarat objeknya. Jadi dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subyeknya (orang atau badan) dan baru kemudian dicari obyeknya. Di dalam Pajak Penghasilan, misalnya di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ditentukan: Pasal 2, Yang menjadi subyek pajak adalah:

²⁶ Sri Pudyatomoko, *Op, Cit.*, hlm.12.

(1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;

(2) Badan

(3) Bentuk usaha tetap

b) Pajak obyektif: Yaitu pajak yang pengenaannya berpangkal pada obyek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subyeknya. Jadi dalam hal ini pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subyeknya (orang atau badan) yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subyek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. Contoh untuk hal ini dapat dilihat pada pajak penghasilan (PPh).²⁷

3) Jenis Pajak Berdasarkan Sifatnya

Pembagian pajak berdasarkan sifatnya akan memunculkan apa yang disebut sebagai pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*) dan pajak kebendaan (*zakelijk*).

a) Pajak yang bersifat pribadi (*persoonlijk*): Yakni pajak yang dalam penetapannya memperhatikan keadaan dari diri serta keluarga wajib pajak. Dalam penentuan besarnya utang pajak, keadaan dan kemampuan wajib pajak diperhatikan. Seperti

²⁷*Ibid.*, hlm. 1-3.

misalnya status wajib pajak kawin/belum, berapa tanggungannya, dan sebagainya. Contoh dari pajak yang bersifat pribadi ini dapat dilihat di dalam pajak penghasilan.

- b) Pajak yang bersifat kebendaan (*zakelijk*): Adalah pajak yang dipungut tanpa memperhatikan diri dan keadaan si wajib pajak. Pajak yang bersifat kebendaan ini umumnya merupakan pajak tidak langsung. Sebagai contoh adalah bea materai. Dalam pajak sejenis ini, siapapun wajib pajaknya, akan dikenakan pajak secara sama. Namun demikian ada pula pajak yang pada umumnya dikategorikan sebagai pajak kebendaan yang dalam hal-hal tertentu masih memperhatikan keadaan wajib pajaknya. Sebagai contoh adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4) Jenis Pajak Berdasarkan Kewenangan Pemungutannya.

Dengan berdasarkan kewenangan pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi dua, yakni pajak yang dipungut pemerintah pusat (pajak pusat), dan pajak yang dipungut daerah (pajak daerah).

- a) Pajak pusat: Yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah pusat. Yang tergolong jenis pajak ini antara lain.²⁸

²⁸ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak* (Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan Humas, 2011), hlm. 5-6.

(1) Pajak Penghasilan (PPh):

PPh adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik darimanapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak tersebut.²⁹

(2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean (dalam wilayah Indonesia), orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

(3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

²⁹Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 67.

- (a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok;
 - (b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
 - (c) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi;
 - (d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status;
 - (e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan atau moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.
- (4) Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga dan efek yang memuat jumlah nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

(5) Pajak Bumi dan Bangunan

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. PBB merupakan pajak pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota.³⁰

³⁰Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Op. Cit.*, hlm. 5-6.

b) Pajak daerah: Yakni pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah daerah, baik pada pemerintah tingkat I maupun pemerintah tingkat II. Seperti ditentukan dalam Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, disebutkan:Pasal 2

(1) Jenis pajak Provinsi terdiri dari:

- (a) Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air;
- (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- (d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

(2) Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:

- (a) Pajak Hotel;
- (b) Pajak Restoran;
- (c) Pajak Hiburan;
- (d) Pajak Reklame;
- (e) Pajak Penerangan Jalan;
- (f) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
- (g) Pajak Parkir;
- (h) Pajak Air Tanah;
- (i) Pajak Sarang Burung Walet;

- (j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- (k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;³¹

d. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi anggaran (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regurelend*).³²

1) Fungsi Anggaran (*budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi sebagai alat atau instrumen yang digunakan untuk memasukkan dana yang sebesar-besarnya ke dalam kas negara. Dalam hal ini fungsi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen untuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan kedalam kas negara. Dana dari pajak itulah yang kemudian digunakan sebagai penopang penyelenggaraan dan aktivitas pemerintah. Fungsi yang seperti itu kiranya sudah dikenal sejak lama, bahkan ada yang menyebut sudah ada sejak jaman purbakala.

Pembiayaan pembangunan yang paling besar saat ini bagi pemerintah adalah melalui penerimaan pajak. Sistem perpajakan yang baik adalah sistem perpajakan yang memberikan pengaruh yang baik terhadap perekonomian negara. Jika tujuan tersebut adalah mengoptimalkan tingkat produksi, kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dengan menegenakan pajak tak langsung. Sebaliknya, jika tujuan yang ingin dicapai adalah pemerataan

³¹Marihot Pahala Siahaan, *Op. Cit.*, hlm. 145

³²Sri Pudyatomoko, SH, M. Hum, *Op. Cit.*, hlm.19

penghasilan, pajak langsung yang progresif lebih tepat digunakan.³³

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk itu pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan kesektor pembangunan.³⁴

2) Fungsi mengatur (*regulelend*)

Di samping mempunyai fungsi sebagai alat penarik dana dari masyarakat untuk dimasukkan ke dalam kas negara seperti tersebut di atas, pajak mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur. Dalam hal ini pajak digunakan untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah. Oleh karenanya fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk dapat mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.³⁵

Misalnya, pemerintah tidak menghendaki industri dalam negeri mati/gulung tikar, maka disini pemerintah membuat peraturan berupa pengenaan tarif yang tinggi bagi hasil produksi barang-barang luar negeri sehingga sulit dijangkau oleh sabagian masyarakat.³⁶

³³Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 38.

³⁴Bohari, *Op. Cit.*, hlm. 134.

³⁵Y. Sri Pudyatomoko, *Op, Cit.*, hlm. 19.

³⁶Bohari, *Op. Cit.*, hlm. 135.

e. Pajak menurut syariah

Secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah* yang berasal dari kata dasar *dharaba*, *yadhribun*, dan *dharaban* yang artinya : Mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan tau membebaskan.

Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama dominan memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib.

Berikut beberapa defenisi dan teori pajak menurut ekonom muslim:

- 1) Abdul Qadim Zallum berpendapat bahwa, “ pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT, kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta.³⁷
- 2) Abu Yusuf dalam kitab *al-Kharaj* (buku tentang perpajakan), “Dalam pandangan saya, sistem perpajakan terbaik untuk menghasilkan pemasukan lebih banyak bagi keuangan negara dan yang paling tepat untuk menghindari kezaliman terhadap para pembayar pajak oleh para pengumpul pajak adalah pajak

³⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: RajawaliPers, 2011), hlm. 31.

pertanian secara proporsional. Sistem ini akan menghalau kezaliman terhadap para pembayar pajak dan menguntungkan keuangan negara”. Dalam hal penetapan pajak, ia lebih merekomendasikan penggunaan sistem *muqasamah (proporsional tax)* daripada sistem *mishah (fixed tax)*.³⁸

- 3) Al-Mawardi dalam kitab *al-ahkam as-sulthaniyyah*, menurutnya “penilaian atas *kharaj*(pajak) harus bervariasi sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah dalam membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman dan sistem irigasi serta jarak antara tanah yang menjadi objek dengan pasar”.³⁹
- 4) Ibn Khaldun berpendapat bahwa, “ jika pajak terlalu rendah, pemerintah tidak dapat menjalani fungsinya, jika pajak terlalu tinggi, tekanan fiskal menjadi terlalu kuat sehingga laba para pedagang dan produsen menurun dan hilang insentif mereka untuk bekerja”.Ibn Khaldun juga membagi pendapatan nasional menjadi tiga kategori, yaitu: gaji, laba, dan pajak, dengan masing-masing kategori ini memiliki tingkat optimum.⁴⁰

Dalam sistem ekonomi konvensional, kita juga mengenal adanya istilah pajak (*tax*), seperti definisi pajak diatas.Pajak di sini maknanya adalah pungutan wajib, berupa uang yang harus dibayar

³⁸ Adiwarmanto azwar karim, *sejarah pemikiran ekonomi islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 245.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 307.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 406.

oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harta beli barang, dan lain-lain. Jadi pajak (*tax*) adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara.

Pengertian ini adalah realitas dari *dharibah* sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, *dharibah* bisa kita artikan dengan pajak (*tax*) secara syar'i dapat kita pakai sekalipun istilah pajak (*tax*) itu berasal dari barat, karena realitasnya ada dalam sistem ekonomi islam.

Pajak adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan Baitul Mal, dapat dihapuskan jika Baitul Mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslimin yang kaya, dan harta digunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum muslimin untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan. Di dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat yang menjelaskan tentang pajak yaitu (Q.S At-Taubat ayat 29)

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari Kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.⁴¹

Pada masa Rasulullah juga terdapat *jizyah* yaitu pajak yang dibayarkan oleh orang muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai, dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* satu Dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tujuan utamanya adalah kebersamaan dalam menanggung beban negara yang bertugas memberikan perlindungan, keamanan dan tempat tinggal bagi mereka dan juga sebagai dorongan kepada kaum kafir untuk masuk Islam. *Jizyah* diambil dari orang-orang kafir laki-laki, telah baligh dan berakal sehat. *Jizyah* tidak wajib atas wanita, anak-anak dan orang gila. *Jizyah* akan berhenti dipungut oleh negara jika orang kafir tersebut telah masuk Islam. *Jizyah* tidak wajib jika orang kafir yang bersangkutan tidak mempunyai kemampuan membayarnya karena kakafiran atau kemiskinannya.⁴²

⁴¹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 191.

⁴² Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 228.

3. Sektor Industri

a. Pengertian Industri

Istilah industri mempunyai dua arti. *Pertama*, industri berarti himpunan perusahaan-perusahaan sejenis. Dalam konteks ini sebutan industri kosmetik, misalnya, berarti himpunan perusahaan-perusahaan penghasil produk-produk kosmetik. *Kedua*, industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan pengolahan itu sendiri dapat bersifat masinal, elektrikal, atau bahkan manual.⁴³

Dalam istilah ekonomi, industri juga mempunyai dua pengertian yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit, dalam pengertian secara luas, industri mencakup semua usaha dan kegiatan dibidang ekonomi yang bersifat produktif, sedangkan pengertian secara sempit, industri adalah suatu kegiatan yang mengubah barang setengah jadi atau barang jadi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) industri manufaktur adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia atau dengan tangan, sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan

⁴³Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hlm. 227.

sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir, termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri dan pekerjaan perakitan.⁴⁴

Diberbagai perekonomian, pertumbuhan selalu digerakkan dan di wujudkan oeh perkembangan sejumlah kecil kegiatan ekonomi yang dapat digolongkan sebagai sektor pertumbuhan primer. Kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut dapat digolongkan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) atau sektor industri pelopor dalam proses pertumbuhan ekonomi.⁴⁵

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian dalam kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki “dasar tukar” (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor indistri memiliki variasi produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marginal yang tinggi kepada pemakainya.⁴⁶

Kuznets dalam buku Sadono melakukan penelitian mengenai sumbangan berbagai sektor kepada produksi nasional dan perubahan struktur ekonomi dalam pembangunan di tiga belas negara yang sekarang ini termasuk kedalam golongan atau kelompok negara maju.

⁴⁴Sumatera dalam Angka 2017/ Sumatera In Figure 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

⁴⁵Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan, Op, Cit.* hlm. 175.

⁴⁶Dumairy, *Op, Cit.*, hlm. 227.

“Dalam penelitiannya Kuznets menyimpulkan bahwa: i) produksi sektor pertanian mengalami perkembangan yang lebih lambat ketimbang perkembangan produksi nasional, sedangkan ii) tingkat pertambahan produksi sektor industri lebih cepat daripada tingkat pertambahan produksi nasional dan iii) tidak adanya perubahan dalam peranan sektor jasa dalam produksi nasional.”⁴⁷

Kemudian Chenery dalam buku Sadono melakukan penelitian mengenai peran berbagai sektor dalam menciptakan produksi nasional dalam proses pembangunan, Chenery menunjukkan tentang corak perubahan peran berbagai sektor dan berbagai industri dalam sub-sektor industri pengolahan dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan adalah sebagai berikut:

“Chenery membuat kesimpulan i) peran sektor industri dalam menciptakan produksi nasional meningkat dari sebesar 17 persen dari produksi nasional pada tingkat pendapatan perkapita sebesar US\$100 menjadi 38 persen pada tingkat pendapatan perkapita sebesar US\$1000. Khusus untuk industri pengolahan, peranannya meningkat dari menciptakan sebanyak 12 persen menjadi 33 persen produksi nasional.ii) peran sektor perhubungan dan pengangkutan juga meningkat dua kali lipat perannya. ii) peran sektor jasa tidak mengalami perubahan yang berarti.”⁴⁸

Dari penelitian yang dilakukan oleh Kuznets dan Chenery, peran sektor industri nasional terhadap produksi nasional memang besar, dimana penelitian tersebut diteliti di berbagai negara maju. Sehingga dapat digambarkan potret perkembangan ekonomi di negara maju, besar peranannya oleh sektor industri.

⁴⁷Sadono Sukirno, *Op. Cit.*, hlm.144-146.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 155.

Nurkse dan Rosenstein-Rodan dalam buku Lincolin juga berpandangan bahwa program industrialisasi di daerah yang kurang berkembang merupakan solusi jitu untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah yang relatif terbelakang agar mereka dapat mengejar ketertinggalannya dari daerah-daerah maju. Untuk menjalankan strategi tersebut, berbagai industri haruslah dibangun secara bersamaan.⁴⁹

b. Argumentasi Industrialisasi

Negara maju pada umumnya negara industri, dan negara berkembang pada umumnya bercorak pertanian, maka pada masa lalu terdapat pandangan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk maju dengan cepat adalah dengan sesegera mungkin melakukan industrialisasi.⁵⁰

Dalam implementasinya ada empat argumentasi atau basis teori yang melandasi suatu kebijakan industrialisasi. Teori-teori dimaksud ialah:⁵¹

- 1) Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*), akan mengembangkan subsektor atau jenis-jenis industri yang memiliki keunggulan komparatif baginya.

⁴⁹Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 21.

⁵¹Dumairy, *Op, Cit.*, hlm. 227.

- 2) Teori argumentasi keterkaitan industri (*industrial linkage*), lebih mengutamakan pengembangan bidang-bidang industri yang paling luas mengait perkembangan bidang-bidang kegiatan atau sektor-sektor ekonomi lain.
- 3) Teori argumentasi kesempatan tenaga kerja (*employment creation*), lebih memprioritaskan pengembangan industri-industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
- 4) Teori argumentasi loncatan teknologi (*technology jump*), percaya bahwa industri-industri yang menggunakan teknologi tinggi (*bi-tech*) akan memberikan nilai tambah yang sangat besar, diiringi dengan kemajuan teknologi bagi industri-industri dan sektor-sektor lain.

c. Strategi Industrialisasi

Ada dua macam yang dikenal sebagai pola strategi industrialisasi, yaitu substitusi impor (*import substitution*) dan promosi ekspor (*export promotion*).

- 1) Substitusi impor (*import substitution*), dikenal juga dengan istilah strategi “orientasi kedalam” atau *inward looking strategy*, ialah suatu strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri untuk menggantikan kebutuhan akan impor produk-produk sejenis. Menurut Cheneri faktor terpenting yang

menyebabkan industrialisasi tumbuh pesat adalah adanya usaha substitusi impor.⁵²

- 2) Promosi ekspor (*export promotion*), yang dikenal sebagai strategi “orientasi keluar” atau *outward looking strategy*, ialah strategi industrialisasi yang mengutamakan pengembangan jenis-jenis industri yang menghasilkan produk-produk untuk ekspor.⁵³

d. Klasifikasi Industri

Klasifikasi industri untuk keperluan perencanaan anggaran negara dengan analisis pembangunan pemerintah membagi sektor industri pengolahan menjadi tiga subsektor yaitu:

- 1) Subsektor industri pengolahan nonmigas;
- 2) Subsektor pengolahan minyak bumi; dan
- 3) Subsektor pengolahan gas alam cair.⁵⁴

Pengelompokan industri yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian (DP), industri nasional di Indonesia dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) **Industri Dasar**, yang meliputi Industri Mesin dan Logam Dasar (IMLD) dan kelompok Industri Kimia Dasar (IKD), yang termasuk dalam IMLD, yaitu: industri mesin pertanian, elektornika, kereta api, pesawat terbang, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium tembaga, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam IKD,

⁵² Sadono Sukirno, *Op, Cit.*, hlm. 157.

⁵³ Dumairy, *Op, Cit.*, 227.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 228

yaitu: industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, industri semen, industri batubara, industri silikat, dan sebagainya.

Industri Dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjuruan struktur industri, dan bersifat padat modal.

2) **Industri Kecil**, yang meliputi: industri pangan (makanan, minuman, tembakau), industri sandang dan kulit (tekstil, pakaian jadi, serta barang dari kulit), industri kimia dan bahan bangunan (industri kertas, percetakan, penerbitan, barang-barang karet, plastik dan lain-lain), industri galian bukan logam dan industri logam (mesin-mesin listrik, alat-alat ilmu pengetahuan, barang dari logam dan sebagainya).

Industri Kecil mempunyai misi untuk melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah atau sederhana, dan padat karya.

3) **Industri Hilir**, yaitu kelompok Aneka Industri (AI) yang meliputi: industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas, dan lain-lain.

Aneka Industri (AI), mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memperluas kesempatan

kerja, tidak padat modal, dan teknologi yang digunakan adalah teknologi menengah dan teknologi maju.⁵⁵

Penggolongan industri dengan pendekatan besar kecilnya skala usaha dilakukan oleh beberapa lembaga, dengan kriteria berbeda. Badan Pusat Statistik membedakan skala industri menjadi 4 lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu;

- 1) Industri besar, berpekerja 100 orang atau lebih;
- 2) Industri sedang, berpekerja antara 20 sampai 99 orang;
- 3) Industri kecil, berpekerja antara 5 sampai 19 orang; dan
- 4) Industri/kerajinan rumah tangga, berpekerja < 5 orang.⁵⁶

e. Keterkaitan industri

Konsep pertumbuhan tidak seimbang oleh Hirschman menunjukkan bahwa pertumbuhan yang cepat dari satu atau beberapa industri dapat mendorong perluasan industri-industri lainnya yang terkait dengan sektor industri yang terlebih dahulu tumbuh tersebut. Keterkaitan-keterkaitan tersebut dapat berwujud:

- 1) Keterkaitan kebelakan (*backward linkage*), di mana ada rangsangan yang diciptakan oleh pembangunan suatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menyediakan *input* (bahan baku) bagi industri tersebut.

⁵⁵Lincoln Arsyad, *Op, Cit.*, hlm454.

⁵⁶Sumatera dalam Angka 2017/ Sumatera In Figure 2017, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.

2) Keterkaitan kedepan (*forward linkage*), di mana ada rangsangan yang diciptakan oleh pembangunansuatu industri terhadap perkembangan industri-industri yang menggunakan produk industri yang pertama sebagai *input* (bahan baku) mereka.⁵⁷

f. Industri Dalam Pandangan Islam

Industri dalam pandangan Islam dapat disamakan dengan produksi dalam pandangan Islam karena sama-sama mentransformasikan *input* menjadi *output*. Segala jenis *input* yang masuk dalam proses produksi untuk menghasilkan *output* disebut faktor produksi. Pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangunan dan perkayaan industri.

Produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama. Motif maksimalisasi keuntungan dan kepuasan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah atau dilarang dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata

⁵⁷Lincoln Arsyad, *Op, Cit.*, hlm. 449

bermotif memaksimalkan keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai memaksimalkan keuntungan akhirat.⁵⁸

Berikut beberapa definisi dan teori produksi/industri menurut ekonom muslim:

1) Al-Ghazali, menganggap kerja adalah sebagai bagian ibadah seseorang dan ia memandang bahwa produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial (*fard al kifayah*). Al-Ghazali juga membagi aktivitas produksi kedalam tiga kelompok, yaitu:

- a) Industri dasar, yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia, yang terdiri dari; agrikultur untuk makanan, tekstil untuk pakaian, konstruksi untuk rumah, dan aktivitas negara dalam menyediakan infrastruktur.
- b) Aktivitas penyokong, yakni aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar, seperti industri baja, eksplorasi dan pengembangan tambang serta sumber daya hutan
- c) Aktivitas komplementer, yakni berkaitan dengan industri dasar seperti, penggilingan dan pembakaran produk-produk agrikultur.⁵⁹

2) Ibnu Khaldun, berpendapat bahwa produksi adalah aktivitas manusia yang diorganisasikan secara sosial dan internasional, ia menyebutkan bahwa manusia adalah binatang ekonomi tujuannya

⁵⁸Mustafa Edwin dkk, *Op, Cit.*, hlm. 102.

⁵⁹Adiwarman azwar karim, *Op, Cit.*, hlm. 329-330

adalah produksi, karena itu manusia harus mencukupi kebutuhan hidupnya, dan produksi berasal dari tenaga kerja manusia.⁶⁰

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekedar untuk konsumsi sendiri atau dijual kepasar. Dua motif itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi, untuk itu kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial, karena dalam sebagian harta kita melekat hak orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial.

Melalui konsep inilah, kegiatan produksi harus bergerak di atas dua garis optimalisasi. Tingkat optimal pertama adalah mengupayakan berfungsinya kondisi *full employment*, di mana setiap orang bekerja dan menghasilkan suatu karya kecuali mereka yang *'udzur syar'i* seperti sakit dan lumpuh. Optimalisasi berikutnya adalah dalam hal memproduksi kebutuhan primer (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan sekunder (*tahsiniyyat*) secara proporsional, dan hanya memproduksi sesuatu yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat (*thayyib*).⁶¹

Di dalam Al-Quran secara tidak langsung Allah telah menganjurkan kita untuk menciptakan sesuatu yang merupakan suatu

⁶⁰*Ibid.*, hlm. 394.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 106-107.

kebutuhan kita sesuai kemampuan yang kita miliki .Hal ini terdapat dalam (Q.S al- Anbiya : 80)

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ
شَاكِرُونَ ﴿٨٠﴾

Artinya: Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu; Maka hendaklah kamu bersyukur (kepada Allah).⁶²

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis, penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu serta persamaan dan perbedaannya dalam penelitian ini.

⁶²Departemen Agama RI, *Op, Cit.*, hlm. 4.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Aprilia Damaningrum	“Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta. (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).” 63	Dengan menggunakan model penelitian regresi linier berganda dengan metode <i>Ordinary Least Square (OLS)</i> , hasil analisis menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu variabel pajak daerah dan jumlah penduduk yang berpengaruh terhadap PDRB Kota Surakarta. Secara simultan, menunjukkan variabel retribusi daerah dan variabel pengeluaran pemerintah terhadap PDRB Kota Surakarta.

⁶³Aprilia Damaningrum, “Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015).

2.	Dihan Lucky	“Analisis pengaruh variabel penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di era desentralisasi. (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang, 2011).” ⁶⁴	Hasil analisis dari penelitian Dihan Lucky di wilayah Keresidenan Malang pada kurun waktu 2004-2009 dengan analisis data panel, yaitu metode <i>Two Stage Square (2SLS)</i> , menunjukkan variabel penerimaan daerah yang diwakili oleh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil pajak ternyata terdapat satu variabel yang negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yaitu variabel pajak daerah sedangkan keempat variabel yang lainnya memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Jasman Saripuddin Hasibuan	“Analisis kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan.” ⁶⁵	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produksi sektor industri kota Medan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan mengalami penurunan, dikarenakan semakin besarnya sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB dan dikarenakan potensi ekonomi kota Medan adalah pada sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi.
4.	Oktavianita BR Bangun	“Analisis peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Sumatera	Berdasarkan analisis input output Sumatera Utara tahun 2003, kesimpulan yang diperoleh adalah; 1. Sektor industri pengolahan di Provinsi Sumatera Utara

⁶⁴Dihan lucky, “Analisis pengaruh variabel penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi” (Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2011).

⁶⁵Jasman saripuddin hasibuan, “Analisis kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010).

		Utara. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institute Pertanian Bogor, 2008).” ⁶⁶	memiliki peran yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat melalui kontribusi yang besar terhadap pembentukan struktur permintaan dan penawaran, konsumsi masyarakat dan pemerintah, investasi, ekspor dan impor nilai tambah bruto, dan struktur output sektoral. 2. Berdasarkan analisis multiplier output tipe 1 dan tipe 2, industri pengolahan menempati urutan kedua dan ketiga dan multiplier pendapatan tipe 1 dan 2 menempati urutan ke 3. 3. Strategi pengembangan sector industry pengolahan di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan memilih lima subsektor sebagai fokus pengalokasian investasi dalam mengatasi masalah pengangguran.
--	--	--	---

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1.	Aprilia Damaningrum	1. Sama-sama meneliti variabel X_1 penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesamaan hipotesis dengan penelitian ini.	2. Penelitian ini dilakukan di Surakarta. 3. Data yang digunakan adalah time series
2.	Dihan Lucky	1. Sama-sama meneliti variabel X_1 penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. Data yang digunakan adalah data panel	1. Penelitian ini dilakukan di wilayah keresidenan Malang. 2. Hasil penelitian tersebut tidak menunjukkan kesamaan hipotesis

⁶⁶ Oktavianita BR Bangun, “ Analisis peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian provinsi sumatera utara” (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008).

			dengan penelitian ini. 3. Penelitian ini meneliti enam variable
3.	Jasman Saripudin hasibuan	1. Sama-sama meneliti variabel sektor industri. 2. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesamaan hipotesis dengan penelitian ini.	1. Penelitian ini dilakukan di Medan. 2. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang menganalisis kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan.
4.	Oktavianti BR Bangun	1. Sama-sama meneliti variabel sektor industri. 2. Hasil penelitian menunjukkan kesamaan dengan hipotesis penelitian ini. 3. Tempat penelitian sama-sama di Sumatera Utara.	1. Pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak <i>Grimp 7.2</i> dan <i>Microsoft Excel</i>

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.⁶⁷

Sumber daya alam dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Peranan barang-barang pertanian untuk ekspor, dan industri pertambangan minyak di dalam pertumbuhan ekonomi di negara-

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 89.

negara Timur Tengah dan di Brunei adalah suatu bukti dari besarnya peranan pengembangan kekayaan alam di dalam permulaan proses pembangunan.

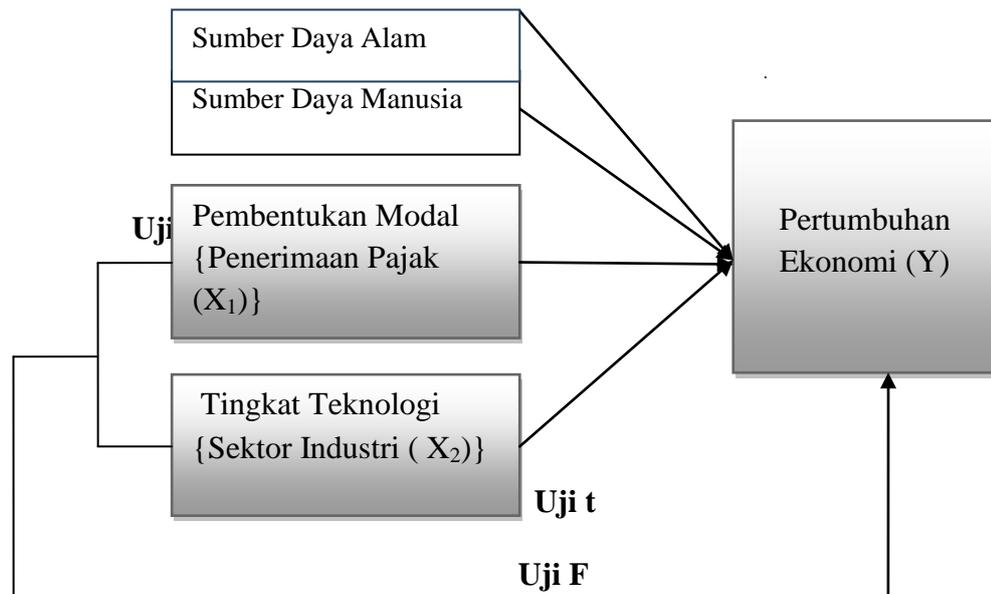
Faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia yaitu jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi, sedangkan jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif. Hal ini akan menyebabkan produktivitas bertambah dan ini selanjtnya akan menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertambahan tenaga kerja.

Pembentukan modal juga salah satu penentu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya, barang-barang modal penting artinya dalam mempertinggi keefesienan pertumbuhan ekonomi. Yaitu dengan cara investasi infrastruktur ekonomi dan sosial. Contohnya, pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif, dimana biaya pembangunannya diperoleh pemerintah dari penerimaan pajak dan retribusi.

Tingkat teknologi dimana bagi kebanyakan ekonom merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang paling penting. Kemajuan teknologi terjadi karena ditemukannya cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam mengenai pekerjaan-pekerjaan tradisional. Seperti contohnya

transformasi sektro pertanian ke sektor industri, dimana sektor industri adalah kegiatan produktif yang mengolah bahan mentah menjadibarangsetengahjadiataubarangjadi.Kegiatanpengolahanitusendiri dapat bersifat masinal, elektrikal, atau bahkan manual. Selanjutnya sektor ini dapat didorong untuk mengekspor produksinya ke negara lain. Ini adalah langkah penting dalam mengembangkan kegiatan ekonomi yang baru yang dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional kepada ekonomi yang lebih modern.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Dari gambar kerangka berfikir di atas ada empat faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sumber daya manusia, sumber daya modal, pembentukan modal, dan tingkat teknologi. Peneliti hanya memfokuskan penelitian pada variabel pembentukan modal yaitu penerimaan pajak (X₁) yang diyakini sebagai modal awal pemerintah dalam mengadakan fasilitas-fasilitas yang menunjang perkembangan produktifitas barang dan

jasa, seperti pembangunan jalan-jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya, yang kesemuanya itu dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif, dimana biaya pembangunannya diperoleh pemerintah dari penerimaan pajak dan retribusi.

Fokus peneliti selanjutnya adalah variabel tingkat teknologi, yaitu sektor industri dimana sektor industri (X_2) adalah transformasi sektor tradisional ke sektor yang lebih modern, yang menggunakan alat dan teknologi canggih dalam memproduksi barang dan jasa agar lebih efektif dan efisien. Kedua variabel tersebut diyakini mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Y).

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.⁶⁸

- a. H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten

⁶⁸*Ibid.*, hlm 93

Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

- b. H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan.
- c. H_a = Terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerimaan Pajak dan Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat dan Kota Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.

Penelitian dilakukan di Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini dilaksanakan mulai dari Nopember 2017 sampai dengan Mei 2018. Pemilihan lokasi di Sumatera Utara selain daerah tempat tinggal peneliti sendiri juga Provinsi Sumatera Utara salah satu Provinsi yang berkontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Nasional Indonesia dengan sumber daya alam yang dimilikinya.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan di laksanakan adalah penelitian kuantitatif. Dimana menurut sugiyono, penelitian kuantitatif data penelitiannya berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.¹ Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan atau pengaruh yang terukur, meramalkan dan mengontrol.²

Metode penelitian kuantitatif juga dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 12

²Hendri Tanjung dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gramata Publishing, 2013). hlm. 74.

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya.⁴ Berdasarkan pengertian diatas, populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak, nilai tambah industri, dan Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

2. Sampel

Sampel adalah wakil semua unit strata dan sebagainya yang ada di dalam populasi.⁵ Dimana sampel tersebut harus betul-betul dapat mewakili populasi, apa yang dipelajari dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi.

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah *sampling purposive*. *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁶ Sampel yang diambil adalah penerimaan pajak, nilai tambah industri, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang,

³Sugiyono *Op. Cit.*, hlm. 89.

⁴Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 99.

⁵*Ibid.*, hlm. 102.

⁶Sugiyono *Op. Cit.*, hlm. 122.

Kabupaten Langkat, dan Kota medan tahun 2007 hingga tahun 2016, dengan pertimbangan di bawah ini.

Tabel 3.1
Kriteria Pemilihan Sampel

NO.	Kriteria
1	Daerah yang memiliki jumlah penduduk 5 persen ke atas, di Sumatera Utara
2	Data dipublikasikan melalui website www.bps.co.id

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang di lakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dari data penerimaan pajak, nilai tambah industri dan pertumbuhan ekonomi yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Jenis data yang digunakan adalah data panel (gabungan data *time series* dan *cross section*) dari tahun 2007-2016.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data panel. Data panel yaitu gabungan dari data *time series* dan *cross section*. Penelitian ini menganalisis penerimaan pajak dan nilai tambah industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat, dan Kota medan tahun 2007-2016, yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu *Eviews* versi 9.0. Beberapa teknik analisis data yang digunakan:

1. Model estimasi data panel

Data panel atau *pooled data* merupakan kombinasi dari data *time series* dan *cross section*. Ada tiga metode yang biasa digunakan untuk bekerja dengan data panel, sebagai berikut.

a) *Common effect*

Metode estimasi dengan *common effect* tidak ubahnya dengan membuat regresi dengan data *cross section* dan *time series*. Sebelum membuat regresi yang harus dilakukan yaitu menggabungkan data *cross section* dengan data *time series*. Kemudian data gabungan ini diperlakukan sebagai satu kesatuan pengamatan yang digunakan untuk mengestimasi model dengan *common effect*, tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku antardaerah sama dalam berbagai kurun waktu. Secara matematis persamaannya adalah sebagai berikut.⁷

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + e_{it}$$

b) *Fixed effect*

Teknik *Fixed effect* adalah model estimasi data panel dimana adanya perbedaan intersep antar daerah sedangkan sloponya tetap sama, peneliti akan menggunakan teknik variabel *dummy* untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut. Model estimasi ini sering disebut dengan teknik *Least squares Dummy Variables*

⁷ Agus Widarjono, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 256.

(LSDV). Model *Fixed Effect* dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai berikut:⁸

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + \beta_3 D_i + e_{it}$$

c) *Random Effect*

Dalam model acak (*random effect*), parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan kedalam *error*. Karena hal inilah, model acak efek juga disebut komponen *error*. Dengan menggunakan model acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan model efek tetap. Keputusan penggunaan model efek tetap maupun acak ditentukan dengan menggunakan uji hausman. Adapun persamaan model estimasi *random effect* adalah sebagai berikut:⁹

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1it} + \beta_2 \ln X_{2it} + V_{it}$$

2. Uji Pemilihan Model Estimasi Data Panel.

Untuk menentukan teknik yang tepat untuk mengestimasi regresi data panel ada tiga uji yang digunakan yaitu :¹⁰

- a) Uji *chow (likelihood ratio)* digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan *fixed effect* tanpa variabel *dummy*.
- b) Uji *hausman* untuk memilih antara *fixed effect* dan *random effect*.

⁸ *Ibid.*, hlm. 257.

⁹ *Ibid.*, hlm. 257.

¹⁰Shochrul Ajija, dkk. *Cara cerdas menguasai Eviews* (Jakarta: Salemba empat, 2011), hlm. 51.

c) Uji *lagrange multiplier* digunakan untuk memilih antara model *common effect* dan *random effect*.

3. Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen berdistribusi normal atau tidak. Keputusan berdistribusi normal atau tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB (*Jarque Bera*) hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 persen. Apakah probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka residual berdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

b) Uji *Multikolinearitas*

Uji *Multikolinearitas* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik *Multikolinearitas*, yaitu adanya hubungan linear antara variable independen dalam model regresi.¹¹ Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai koefisien korelasi antarvariabel independen, apabila nilai koefisien korelasinya adalah cukup besar (0.8) patut di duga adanya hubungan linier antarvariabel atau dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas.

c) Uji *Heteroskedastisitas*

¹¹ Agus Widarjono, *Op, Cit.*, hlm. 135.

Uji *Heteroskedastisitas* digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik *heteroskedastisitas*, yaitu residual dari model regresi mempunyai varian residual yang tidak konstan.¹² Dalam penelitian ini peneliti melihat ada atau tidaknya gangguan heteroskedastisitas dengan menggunakan uji *park* yaitu melihat nilai probabilitas masing-masing variabel independen yaitu dengan ketentuan jika nilai probabilitas variabel independen > taraf signifikan 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

d) Uji *Autokolerasi*

Uji *Autokolerasi* bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Ada atau tidaknya autokorelasi dilihat dengan uji Durbin Watson (DW test).

Penelitian ini tidak menggunakan uji *Autokorelasi*, karena dari sifatnya *autokorelasi* lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu, sedangkan penelitian ini menggunakan data panel sehingga tidak digunakan uji *autokorelasi*.¹³

4. Uji Hipotesis

a) Uji Parsial (t- test)

¹² *Ibid.*, hlm. 145.

¹³ *Ibid.*, hlm., 177.

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujiannya sebagai berikut:

- $t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}} = H_0$ diterima

$t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}} = H_0$ ditolak

b) Uji Simultan (UjiF)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh sekelompok variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

Jika $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ maka H_0 di tolak.

Jika $F_{\text{hitung}} < F_{\text{tabel}}$ maka H_0 di terima.¹⁴

5. Uji Koefisien Determinasi R^2

Uji koefisien determinasi R^2 atau (R^2 *adjusted*), untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.¹⁵ Nilai R^2 berkisar antara 0-1. Semakin mendekati 1, akan semakin baik.

6. Analisis Regresi berganda

Regresi berganda adalah model regresi dengan lebih dari satu variabel independen, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi

¹⁴ Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikasi* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011), hlm. 88.

¹⁵ Agus Widarjono, *Op, Cit.*, hlm. 86

variabel dependen.¹⁶ Penelitian ini menggunakan data logaritma natural (Ln) karena estimasi dengan data asli yang diperoleh hasilnya kurang baik, dalam penelitian ini memasukkan variabel dummy karena model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

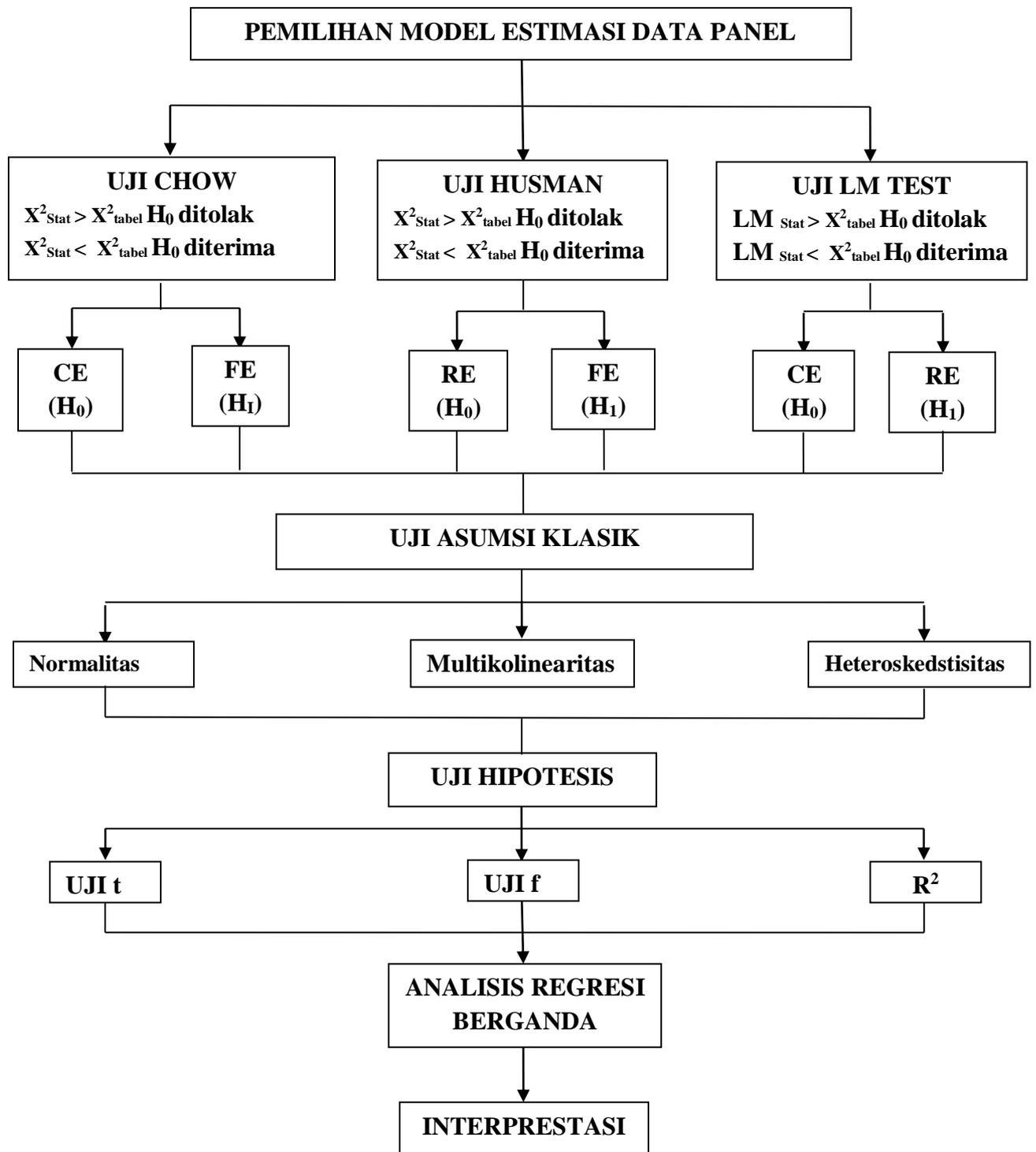
$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PJK_{it} + \beta_2 INDSTR_{it} + \beta_3 DUMMY_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PE	= Pertumbuhan Ekonomi
β_0	= <i>Intercept</i>
$\beta_1 - \beta_3$	= <i>Slope</i>
i	= Kota
t	= Tahun
PJK	= Penerimaan Pajak
INDSTR	= Sektor Industri
DUMMY	= Krisis Ekonomi tahun 2008
e	= Koefisien Pengganggu

¹⁶ Damodar N. Gurajati, *Dasar-dasar ekonometrika jilid ketiga* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 180.

Gambar 3.1
Kerangka Model Regresi



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Sumatera Utara merupakan Provinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara dihuni oleh penduduk dari berbagai suku seperti Melayu, Batak, Nias, Aceh, Minangkabau, Jawa, dan berbagai suku lainnya.

Pada tahun 2016 penduduk Sumatera Utara berjumlah 14.102.911 jiwa, yang terdiri dari 7.037.326 jiwa penduduk laki-laki dan 7.065.585 jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin *sex ratio* sebesar 99,60 dan penduduk Sumatera Utara lebih banyak tinggal di daerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan. Jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan adalah 7.335.587 jiwa dan yang tinggal di daerah pedesaan adalah 6.767.324 jiwa.

Pusat pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terletak di Kota Medan. Sebelumnya, Sumatera Utara termasuk kedalam Provinsi Sumatera saat Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tahun 1950, Provinsi Sumatera Utara dibentuk yang meliputi keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli, dan Aceh. Tahun 1956, Aceh memisahkan diri menjadi Daerah Istimewa Aceh. Sumatera Utara dibagi kepada 25 Kabupaten, 8 Kota (dahulu kotamadya), 325 Kecamatan, dan 5.456 Kelurahan/Desa. Berikut 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1
Kabupaten/Kota & Pusat Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara

No.	Kabupaten/Kota	Pusat Pemerintahan
1	Kabupaten Nias	Gunungsitoli
2	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok
4	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan
5	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung
6	Kabupaten Toba Samosir	Pangururan
7	Kabupaten Labuhan Batu	Rantau Parapat
8	Kabupaten Asahan	Kisaran
9	Kabupaten Simalungun	Raya
10	Kabupaten Dairi	Sidikalang
11	Kabupaten Karo	Kabanjahe
12	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam
13	Kabupaten Nias Selatan	Teluk Dalam
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul
15	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak
16	Kabupaten Samosir	Balige
17	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah
18	Kabupaten Batubara	Limapuluh
19	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua
20	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan
21	Kabupaten Labuhan batu Selatan	Kota Pinang
22	Kabupaten Labuhan batu Utara	Aek Kanopan
23	Kabupaten Nias Utara	Lotu
24	Kabupaten Nias Barat	Lahomi
25	Kabupaten Langkat	Stabat
26	Kota Sibolga	Sibolga
27	Kota Tanjung Balai	Tanjung Balai
28	Kota Pematangsiantar	Pematangsiantar
29	Kota Tebing Tinggi	Tebing Tinggi
30	Kota Medan	Medan
31	Kota Binjai	Binjai
32	Kota Padangsidimpuan	Padangsidimpuan
33	Kota Gunungsitoli	Gunungsitoli

Berdasarkan sensus penduduk 2010 di Sumatera Utara, terdapat lima daerah yang memiliki jumlah penduduk mencapai 5 persen ke atas yaitu Kabupaten Asahan (5,19 persen), Kabupaten Simalungun (6,30 persen), Kabupaten Deliserdang (13,91 persen), Kabupaten Langkat (7,52 persen) dan Kota Medan (15,93 persen), kelima daerah ini termasuk daerah yang memberikan sumbangan besar terhadap perekonomian Sumatera Utara, baik dilihat dari segi penerimaan pajaknya maupun sumbangan sektor industrinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Utara.

1. Kabupaten Asahan

Kabupaten Asahan adalah sebuah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini beribu kotakan Kisaran dan mempunyai wilayah seluas 3.675 km². Ibu kota Terdahulu Kabupaten Asahan ialah Tanjung Balai. Kabupaten Asahan memiliki penduduk berjumlah 706.283 jiwa. Asahan juga merupakan Kabupaten pertama di Indonesia yang membentuk lembaga pengawas pelayanan umum bernama "Ombudsman" Daerah Asahan, melalui SK Bupati Asahan Nomor: 419-Huk/Tahun 2004, tanggal 20 Oktober 2004. Di era kolonial, wilayah ini disebut sebagai Assaban oleh orang Eropa.

Secara astronomis Kabupaten Asahan berada pada 2°03'- 3°26' Lintang Utara, 99°1'-100°0' Bujur Timur dengan ketinggian 0–1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Asahan menempati area seluas 371.945 Ha yang terdiri dari 13 Kecamatan, 176 Desa/Kelurahan Definitif. Wilayah Kabupaten Asahan di sebelah Utara berbatasan

dengan Kabupaten Batu Bara, di sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhan Batu dan Toba Samosir, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Simalungun dan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Asahan Tahun 2007-2016.

Tabel. 4.2
PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Asahan Tahun 2007-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan		Penerimaan Pajak		Nilai Tambah Industri	
	Milyar	Persen	Milyar	Persen	Milyar	Persen
2007	4.670,79	-54,22	11,07	3,99	3.069,04	38,25
2008	4.905,42	5,02	6,27	-43,36	844,53	-72,48
2009	5.134,42	4,67	6,90	10,05	891,09	5,51
2010	5.389,83	4,97	7,10	2,90	1.157,53	29,90
2011	13.650,24	153,3	12,28	72,96	1.912,58	65,23
2012	17.872,41	30,93	13,58	10,59	2.231,85	16,69
2013	18.892,62	5,71	25,78	89,84	1.198,05	-46,32
2014	20.003,08	5,88	28,17	9,27	2.385,57	99,12
2015	21.117,02	5,57	31,24	10,90	1.712,25	-28,22
2016	22.308,20	5,64	42,93	37,42	11.113,71	549,07

Sumber: BPS Sumatera Utara. diolah

Berdasarkan tabel 4.2 Di atas pada tahun 2007 nilai tambah industri dan penerimaan pajak di Kabupaten Asahan sama-sama mengalami peningkatan masing-masing 38,25 persen dan 3,99 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 54,22 persen. Kemudian tahun 2008 nilai tambah industri dan penerimaan pajak sama-sama mengalami penurunan masing-masing 72,48 persen dan 43,36 persen, sementara pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Selama dua tahun tersebut ketiga variabel menunjukkan hubungan yang negatif. Untuk tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan begitu juga dengan penerimaan pajak, akan tetapi nilai tambah industri mengalami penurunan di tahun 2013 dan 2015 masing-masing 46,32 persen dan 28,22 persen.

2. Kabupaten Simalungun

Kabupaten Simalungun adalah sebuah kabupaten di Sumatera Utara, Indonesia. Suku Batak Simalungun merupakan penduduk asli dari kabupaten ini. Kabupaten Simalungun terletak antara $2,36^{\circ}$ – $3,18^{\circ}$ LU dan $98,32^{\circ}$ – $99,35^{\circ}$ BT, berada pada ketinggian 20 – 1.400 m di atas permukaan laut. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karo, sebelah timur dengan Kabupaten Asahan, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai dan sebelah selatan dengan Kabupaten Toba Samosir.

Kabupaten Simalungun dengan luas 4.386,60 Km² atau 6,12% dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara terdiri dari 31 Kecamatan, 343 desa /nagori dan 24 Kelurahan dengan jarak rata-rata ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten antara 13 km s/d 97 km. Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk oleh BPS Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam Simalungun Dalam Angka 2008, jumlah penduduk Kabupaten Simalungun adalah 846.329 yang terdiri dari 423.747 orang laki-laki dan 422.582 orang perempuan dengan perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*) sebesar 100,3 dan kepadatan penduduknya sebesar

192,9 jiwa/Km². Luas wilayah terbesar berada di Kecamatan Raya dengan luas 335.60% Km² dan wilayah terkecil di Kecamatan Haranggaol Horison 34.50 Km². Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bandar dengan 66.739 jiwa dan terkecil berada di Kecamatan Haranggaol Horison dengan jumlah penduduk 5.789 jiwa. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Simalungun Tahun 2007-2016.

Tabel. 4.3
PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Simalungun Tahun 2007-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan		Penerimaan Pajak		Nilai Tambah Industri	
	Milyar	Persen	Milyar	Persen	Milyar	Persen
2007	4823,35	53,13	10,83	0,09	658,27	53,91
2008	5049,40	46,87	10,93	0,92	1135,31	72,47
2009	5299,69	49,57	11,40	4,30	1318,86	16,17
2010	5571,10	51,21	11,73	2,89	1429,55	8,39
2011	11627,58	1087,12	26,89	129,24	1877,50	31,34
2012	19117,54	644,15	51,30	90,78	1042,36	-44,48
2013	20122,01	52,54	30,76	-40,04	1179,17	13,13
2014	21194,28	53,29	33,13	7,70	1906,10	61,65
2015	22304,11	52,36	80,72	143,65	1148,50	-39,75
2016	23507,97	53,97	50,53	-37,40	4557,42	296,81

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dari tahun 2007 sampai 2011 nilai tambah industri dan penerimaan pajak di Kabupaten Simalungun mengalami peningkatan yang diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2012 nilai tambah industri turun 44,48 persen, penerimaan pajak naik 90,78 persen dan pertumbuhan ekonomi naik 51,30 persen, tahun 2013 penerimaan pajak menunjukkan penurunan

40,04 persen sementara nilai tambah industri dan pertumbuhan ekonomi naik masing-masing 13,13 persen dan 52,54 persen. Tahun selanjutnya pertumbuhan ekonomi selalu mengalami peningkatan, dan nilai tambah industri turun di tahun 2015 sebesar 39,75 persen dan penerimaan pajak kembali turun di tahun 2016 sebesar 37,40 persen.

3. Kabupaten Deli Serdang

Kabupaten Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi cukup menjanjikan. Dulu wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Memang dalam sejarahnya, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah ini terdiri dari dua pemerintahan yang berbentuk kerajaan (kesultanan) yaitu Kesultanan Deli berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan.

Kabupaten Deli Serdang secara geografis, terletak diantara $2^{\circ}57'$ - $3^{\circ}16'$ Lintang Utara dan antara $98^{\circ}33'$ - $99^{\circ}27'$ Bujur Timur, merupakan bagian dari wilayah pada posisi silang di kawasan Palung Pasifik Barat dengan luas wilayah 2.497,72 Km² Dari luas Propinsi Sumatera Utara, dengan batas sebagai berikut : - Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Sumatera.- Sebelah Selatan berbatasan dergan Kabupaten Karo. - Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai- Sebelah

Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007-2016.

Tabel. 4.4
PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007-2016

Tahun	PDRB Harga Konstan		Penerimaan Pajak		Nilai Tambah Industri	
	Milyar	Persen	Milyar	Persen	Milyar	Persen
2007	12264,03	5,73	55,15	17,52	3247,22	19,69
2008	12977,94	5,82	60,85	10,34	3645,01	12,25
2009	13698,06	5,55	72,70	19,47	3523,43	-3,34
2010	14516,73	5,98	78,21	7,58	5229,37	48,42
2011	45125,83	210,85	252,08	222,31	5905,99	12,94
2012	47513,87	5,29	320,00	26,94	6014,50	1,84
2013	51896,06	9,22	364,72	13,98	7315,54	21,63
2014	55790,75	7,50	418,68	14,79	15373,33	110,15
2015	58713,67	5,24	463,13	10,62	5609,47	-63,51
2016	61839,67	5,32	487,19	5,20	44694,69	696,77

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah

Berdasarkan tabel 4.4 diatas pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak di Kabupaten Deli Serdang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara nilai tambah industri mengalami penurunan di tahun 2009 dan tahun 2015, masing-masing 3,34 persen dan 63,51 persen. laju pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2011 untuk variabel penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi masing-masing 222,31 persen dan 210,85 persen untuk nilai tambah industri hanya 12,94 persen. laju pertumbuhan nilai tambah industri berada di tahun 2016 sebesar 696,77 persen.

4. Kabupaten Langkat

Wilayah pesisir timur Sumatera Utara yang memiliki panjang pantai 545 km berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Wilayah yang termasuk wilayah pesisir timur Sumatera Utara adalah Kabupaten Langkat yang disebut wilayah up-land yaitu kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang merupakan daerah belakang yang berpengaruh terhadap ekosistem kawasan dibawahnya (kawasan pantai pesisir hingga laut).

Kabupaten Langkat, terletak antara $3^{\circ}14'$ – $4^{\circ}13'$ LU dan $97^{\circ}52'$ – $98^{\circ}45'$ BT. Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6,262.49 km² terdiri dari 20 Kecamatan, 226 desa dan 34 kelurahan. Kecamatan paling luas adalah kecamatan Bahorok (955.10 km²), namun jumlah penduduk paling besar berada di Kecamatan Stabat

Secara topografi, Kabupaten Langkat berada pada dataran rendah/rawa, bukit-bukit bergelombang dan dataran tinggi pada sisi barat Bukit Barisan dengan ketinggian 0 – 1200 meter di atas permukaan laut. Keadaan kelerengan di daerah ini didominasi kelerengan 0 – 2 % sebesar 59,40 % dari luas Kabupaten Langkat. Kelerengan terkecil adalah kelerengan 15 – 40 % sebesar 6,8 % dari luas lahan. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Langkat Tahun 2007-2016.

Tabel. 4.5
PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten
Langkat Tahun 2007-2016.

Tahun	PDRB Harga Konstan		Penerimaan Pajak		Nilai Tambah Industri	
	Milyar	Persen	Milyar	Persen	Milyar	Persen
2007	6178,02	4,91	11,74	0,17	637,04	6,25
2008	6491,75	5,08	11,89	1,28	882,95	38,60
2009	6819,23	5,04	14,30	20,27	1038,79	17,65
2010	7210,56	5,74	14,79	3,43	1555,39	49,73
2011	19565,25	171,34	18,89	27,72	1401,13	-9,92
2012	20858,68	6,61	32,09	69,88	1356,79	-3,16
2013	22029,48	5,61	28,14	-12,31	1108,89	-18,27
2014	23157,12	5,12	37,90	34,68	1216,62	9,72
2015	24321,61	5,03	42,12	11,13	1679,64	38,06
2016	25533,81	4,98	45,46	7,93	7595,70	352,22

Sumber: BPS Sumatera Utara, diolah

Berdasarkan tabel 4.5 diatas pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan yang cukup signifikan PDRB harag konstan tertinggi berada di tahun 2016 sebesar 25.533,81 milyar sedangkan laju pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2011 yaitu 171,34 persen, untuk penerimaan pajak hanya mengalami penurunan di tahun 2013 saja dari 32,09 milyar menjadi 28,14 milyar penurunannya sebesar 12,31 persen, dan untuk nilai tambah industri mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2011 sebesar 9,92 persen, tahun 2012 sebesar3,16 persen, dan tahun 2013 sebesar 18,27 persen.

5. Kota Medan

Kota Medan adalah ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Pulau Jawa. Kota

Medan merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat dengan keberadaan Pelabuhan Belawan dan Bandar Udara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Akses dari pusat kota menuju pelabuhan dan bandara dilengkapi oleh jalan tol dan kereta api. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api. Berbatasan dengan Selat Malaka menjadikan Medan kota perdagangan, industri, dan bisnis yang sangat penting di Indonesia.

Medan adalah kota multietnis yang mana penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda. Selain Melayu sebagai penghuni awal, Medan didominasi oleh etnis Jawa, Batak, Tionghoa, Mandailing, dan India. Mayoritas penduduk Medan bekerja di sektor perdagangan, sehingga banyak ditemukan ruko di berbagai sudut kota. Di samping kantor-kantor pemerintah provinsi, di Medan juga terdapat kantor-kantor konsulat dari berbagai negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, dan Jerman.

Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatera Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan

cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Bersama kawasan metropolitannya (Kota Binjai dan Kabupaten Deli Serdang) penduduk Medan mencapai 4.144.583 jiwa. Dengan demikian Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbesar di Sumatera dan keempat di Indonesia. Berikut tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kota Medan Tahun 2007-2016.

Tabel. 4.6
PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri
di Kota Medan Tahun 2007-2016.

Tahun	PDRB Harga Konstan		Penerimaan Pajak		Nilai Tambah Industri	
	Milyar	Persen	Milyar	Persen	Milyar	Persen
2007	29352,92	7,78	181,08	1,70	9442,48	138,71
2008	31373,95	6,89	197,11	8,85	9505,93	0,67
2009	33430,05	6,55	226,60	14,96	9983,86	5,03
2010	35822,22	7,16	300,88	32,78	6838,72	-31,50
2011	93462,49	160,91	547,63	82,01	10758,26	57,31
2012	105162,00	12,52	948,18	73,14	15958,21	48,33
2013	110795,42	5,36	1190,00	25,50	56694,81	255,27
2014	117525,06	6,07	1167,40	-1,90	36411,67	-35,78
2015	124269,93	5,74	1249,26	7,01	20232,54	-44,43
2016	132062,86	6,27	1316,13	5,35	26225,15	29,62

Sumber: Badan Pusat Statistik diolah

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, PDRB harga konstan cenderung mengalami peningkatan, laju pertumbuhan tertinggi berada di tahun 2011

sebesar 160,91 persen, penerimaan pajak hanya mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 1,90 persen, dan untuk nilai tambah industri mengalami penurunan di tahun 2010, 2014, dan 2015 masing-masing 31,50 persen, 35,78 persen, dan 44, 43 persen.

B. Hasil Estimasi

1. Model Estimasi data Panel

Dalam memilih model estimasi data panel yang tepat, pertama kali ada tiga model regresi yang harus dipilih yaitu *Common Effect Model* (*Pool Least Square*) dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*), *Fixed Effect Model* dengan menggunakan variabel *Dummy* dan *Random Effect Model* dengan menghitung *error* data panel dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*).

Tabel. 4.7
Hasil estimasi Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect

Model	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Common Effect	Ln(PJK)	0.558453	0.085640	6.520963	0.0000
	Ln(INDSTR)	-0.006953	0.109103	-0.063733	0.9495
	Ln(C)	7.780313	0.609696	12.76096	0.0000
Fixed Effect	Ln(PJK)	0.749545	0.097728	7.669698	0.0000
	Ln(INDSTR)	0.047564	0.109989	0.432443	0.6676
	Ln(C)	6.565617	0.697155	9.417722	0.0000
Random Effect	Ln(PJK)	0.564693	0.078033	7.236616	0.0000
	Ln(INDSTR)	-0.006290	0.098996	-0.063534	0.9496
	Ln(C)	7.749712	0.555924	13.94024	0.0000

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

2. Uji Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Setelah dilakukan estimasi ketiga model tersebut, kemudian dipilih model estimasi yang tepat dengan melakukan uji *F Teast* (uji Chow), *Hausman Test*, dan uji LM (*Langrangge Multiplier*).

a. Uji *Cohw*

Uji *Chow* digunakan untuk membandingkan model mana yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam analisis ini adalah, sebagai berikut:

$H_0 = \text{Common Effect}$ yang paling sesuai

$H_1 = \text{Fixed Effect}$ yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel.

$X^2 > X^2_{tabel} = H_0$ ditolak

$X^2 < X^2_{tabel} = H_1$ diterima

Tabel.4.8 Uji Chow

Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.817478	(4,43)	0.0096
Cross-section Chi-square	15.194288	4	0.0043

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Berdasarkan Uji Chow di atas, diperoleh nilai *chi-square* hitung sebesar 15.194288 lebih besar dari *chi-square* tabel 9.48773 sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_1 diterima. Hasil dari uji ini menyatakan bahwa model yang paling sesuai antara *Common Effect* dan *Fixed Effect* adalah *Fixed Effect*.

a. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* adalah uji yang menentukan model estimasi yang paling sesuai antara *Random Effect* dan *Fixed Effect*. Hipotesis yang digunakan dalam uji ini adalah, sebagai berikut:

$H_0 = \text{Random Effect}$ yang paling sesuai

$H_1 = \text{Fixed Effect}$ yang paling sesuai

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan membandingkan *chi-square* hitung dengan *chi-square* tabel.

$X^2 > X^2_{tabel} = H_0$ ditolak

$X^2 < X^2_{tabel} = H_1$ diterima

Tabel 4.9
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.645409	2	0.0018

Sumber: *Output Eviews Versi 9.0*

Berdasarkan tabel uji Hausman di atas diperoleh nilai *chi-square* hitung sebesar 12.645409 lebih besar dari nilai *chi-square* tabel sebesar 5.99146 yang artinya, H_0 diterima dan model yang paling sesuai menurut uji ini adalah *Fixed Effect*, karena model *Fixed Effect* sudah terpilih sebanyak dua kali, artinya model *Fixed Effect* yang sesuai dalam penelitian ini.

Fixed Effect Model adalah model estimasi yang memiliki intersep yang berbeda pada setiap *cross section*nya, selain itu model

ini juga menggunakan variabel *dummy* sebagai variabel bebas. Variabel *dummy* dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008, dimana angka 0 menunjukkan ketiadaan sebuah atribut dan angka 1 menunjukkan keberadaan sebuah atribut.¹ Sehingga persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 PJK_{it} + \beta_2 INDSTR_{it} + \beta_3 DUMMY_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

PE	= Pertumbuhan Ekonomi
β_0	= Intercept
$\beta_1 - \beta_3$	= Slope
i	= Kota
t	= Tahun
PJK	= Penerimaan Pajak
INDSTR	= Sektor Industri
DUMMY	= Krisis Ekonomi tahun 2008
e	= Koefisien Pengganggu

3. Uji Asumsi Kasik

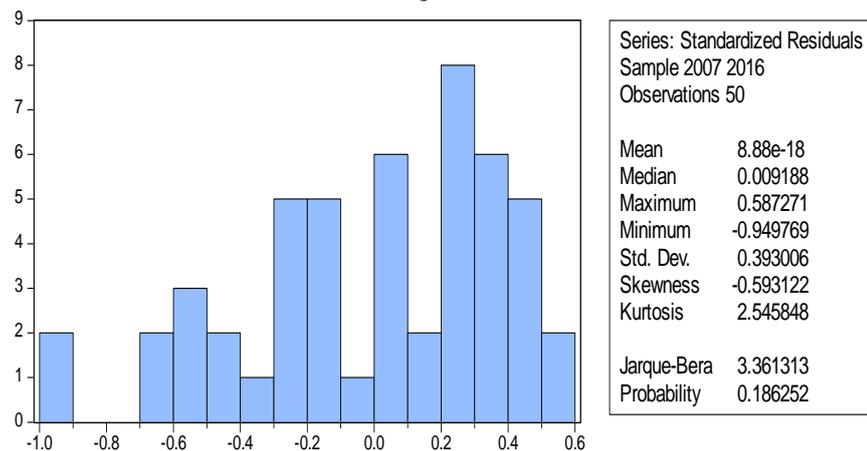
Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji Normalitas, *Heteroskedastisitas*, dan *Multikolinearitas*. Hal ini disebabkan karena penelitian ini menggunakan data panel, di mana *Autokorelasi* lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtut waktu, karena berdasarkan sifatnya data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa sebelumnya.

¹Gujarati, *Dasar-dasar Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 1.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah salah satu uji untuk melihat kenormalan data.

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Sumber: *Output Eviews Versi 9.0*

Dari gambar di atas diketahui nilai *Jarque-Bera* sebesar $3,361313 >$ tingkat signifikan $0,05$. Dapat disimpulkan pertumbuhan ekonomi (Y), penerimaan pajak (X1), dan sektor industri (X2) berdistribusi normal.

b. Uji *Heteroskedastisitas*

Untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas menggunakan uji *park* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas variabel independen di atas nilai taraf signifikan maka data dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil uji *park* yang dilakukan terhadap data yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.10
Hasil Uji Park

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.334462	0.308974	1.082491	0.2852
PJK	-0.033384	0.045820	-0.728596	0.4703
INDSTR	-0.009548	0.048179	-0.198176	0.8439
DUMMY	0.031235	0.096724	0.322930	0.7484

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Berdasarkan tabel 4.9 di atas terlihat nilai probabilitas untuk semua variabel independen di atas taraf signifikan 0,05, artinya tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

c. Uji *Multikolinearitas*

Multikolinearitas merupakan keadaan dimana terdapat hubungan linear atau terdapat korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinearitas dilihat dari nilai koefisien korelasi antarvariabel independen, apabila nilai koefisien korelasinya adalah cukup besar (0,8) patut di duga adanya hubungan linier antarvariabel atau dalam persamaan tersebut terjadi multikolinearitas.

Table 4.11
Uji Multikolinearitas

Correlation

	D(PJK)	D(INDSTR)	D(DUMMY)
D(PJK)	1.000000	0.153574	-0.092144
D(INDSTR)	0.153574	1.000000	0.060000
D(DUMMY)	-0.092144	0.060000	1.000000

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa model persamaan tidak mengandung multikolinearitas karena koefisien korelasi antarvariabel menunjukkan nilai yang rendah yaitu di bawah 0,8.

4. Uji Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Dengan taraf signifikan 0,05. Taraf signifikanyang digunakan bisa 0,05 atau 0,01, tetapi dalam ilmu sosial, taraf signifikan 0,05 sudah cukup memadai.² Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Penerimaan Pajak terhadap

Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

H_a = Terdapat pengaruh Penerimaan Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Sektor Industri terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

H_a = Terdapat pengarug Sektor Industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

²Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikatif* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 88.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara.

H_a = Terdapat pengaruh Variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

Adapun penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Nilai t_{tabel} diperoleh dengan menggunakan tabel t pada taraf signifikan 0,05 dengan rumus $df = n - k$, n adalah jumlah seluruh observasi dan k adalah banyaknya variabel bebas. Dalam penelitian ini n berjumlah 50 dan k berjumlah 2, sehingga df yg diperoleh 48 pada taraf signifikan 0,05, nilai t_{tabel} sebesar 2,01063. Kriteria ujinya adalah sebagai berikut.

- $t_{tabel} < t_{hitung} < t_{tabel} = H_0$ diterima

$t_{hitung} < - t_{tabel}$ dan $t_{hitung} > t_{tabel} = H_0$ ditolak

Tabel 4.12
Uji t

Variable	t-Statistic	Prob.
C	9.483477	0.0000
PJK	6.773951	0.0000
INDSTR	0.502692	0.6178
DUMMY	-1.077076	0.2876

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Berdasarkan tabel di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengaruh variabel Penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji t di atas t_{hitung} di peroleh $6,773951 >$ dari t_{tabel} 2,01063. sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

- 2) Pengaruh variabel sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi

Berdasarkan hasil uji t di atas t_{hitung} diperoleh $0,502692 <$ dari t_{tabel} 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sektor industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

- 3) Pengaruh variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil uji t di atas t_{hitung} diperoleh $-1,077076 <$ dari t_{tabel} 2,01063. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *dummy* yaitu penerimaan pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

- b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan secara keseluruhan. Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh Penerimaan pajak, Sektor industri dan variabel *dummy* terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

H_1 = Penerimaan pajak, Sektor industri dan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Penetapan hipotesis dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} . Taraf signifikan yang digunakan adalah 0,05, df untuk pembilang dengan rumus $k-1$ dan df untuk penyebut dengan rumus $n-k$. k adalah jumlah variabel bebas dan n adalah jumlah observasi, sehingga diperoleh df pembilang adalah 1 dan df penyebut adalah 48. Nilai F_{tabel} diperoleh sebesar 4,04. ketentuan yang digunakan adalah sebagai berikut.

$F_{hitung} > F_{tabel} = H_0$ ditolak

$F_{hitung} < F_{tabel} = H_0$ diterima

Tabel 4.13
Uji F

R-squared	0.851545	Mean dependent var	9.980000
Adjusted R-squared	0.826802	S.D. dependent var	1.020004
S.E. of regression	0.424495	Akaike info criterion	1.269815
Sum squared resid	7.568243	Schwarz criterion	1.575739
Log likelihood	-23.74538	Hannan-Quinn criter.	1.386313
F-statistic	34.41625	Durbin-Watson stat	1.380048
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F_{hitung} 34,41625 > F_{tabel} 4,04, sehingga H_0 di tolak dan H_1 diterima. Dapat

disimpulkan bahwa penerimaan pajak, Sektor industri dan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi R^2 atau (R^2 *adjusted*), untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Dalam penelitian ini nilai koefisien determinasi yang digunakan adalah R-Squared. Hasil uji Koefisien determinasi bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.14
Uji Koefisien Detreminasi

R-squared	0.851545	Mean dependent var	9.980000
Adjusted R-squared	0.826802	S.D. dependent var	1.020004
S.E. of regression	0.424495	Akaike info criterion	1.269815
Sum squared resid	7.568243	Schwarz criterion	1.575739
Log likelihood	-23.74538	Hannan-Quinn criter.	1.386313
F-statistic	34.41625	Durbin-Watson stat	1.380048
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0,851545. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak, sektor industri dan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 85,15 persen, sedangkan sisanya sebesar 14,85persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

6. Uji Regresi Berganda

Regresi berganda adalah model regresi dengan lebih dari satu variabel penjelas, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini memasukkan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) karena model estimasi yang digunakan adalah *Fixed Effect*. Model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel *dummy* untuk menangkap adanya perbedaan intersep.

Tabel 4.15
Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.691242	0.705568	9.483477	0.0000
PJK	0.708777	0.104633	6.773951	0.0000
INDSTR	0.055306	0.110020	0.502692	0.6178
DUMMY	-0.237902	0.220878	-1.077076	0.2876

Sumber: Output Eviews Versi 9.0

Persamaan regresi dalam penelitian adalah sebagai berikut :

$$\ln PE_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PJK_{it} + \beta_2 \ln INDSTR_{it} + \beta_3 DUMMY_{it} + e_{it}$$

Berdasarkan persamaan di atas, maka diperoleh model regresi secara umum sebagai berikut :

$$PE = 6.691242 + 0.708777 PJK + 0.055306 INDSTR - 0.237902 DUMMY$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan hasil sebagai berikut :

- a. Nilai intersep sebesar 6,691242. Memiliki arti jika penerimaan pajak, sektor industri dan *dummy* bernilai 0, maka pertumbuhan ekonomi sebesar 6.69 persen.
- b. Koefisien variabel penerimaan pajak adalah 0,708777. Berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika penerimaan pajak meningkat 1 milyar maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,57 persen.
- c. Koefisien variabel sektor industri adalah 0,055306. Berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa sektor industri memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika sektor industri meningkat 1 milyar maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat sebesar 0,05 persen.
- d. Koefisien variabel penerimaan pajak setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) adalah - 0.237902. Berdasarkan hasil ini, dapat dilihat bahwa variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) sebesar 1 persen maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,23 persen.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tahun 2007-2016,

penelitian ini menggunakan data panel, gabungan *time series* dan *cross section*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 5 *cross section* yaitu Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan.

Model penelitian yang digunakan adalah model estimasi *Fixed Effect*, dimana dalam model estimasi *Fixed Effect* menambahkan variabel *dummy* dalam penelitiannya, variabel *dummy* yang digunakan adalah Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 Hasil uji hipotesis yang diperoleh menunjukkan variabel penerimaan pajak yang memiliki kesamaan dengan hipotesis dalam penelitian ini, hal ini dibuktikan melalui t_{hitung} dari uji t untuk variabel penerimaan pajak adalah 6,773951 lebih besar dari t_{tabel} 2,01063 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penerimaan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Nilai t_{hitung} dari uji t yang diperoleh untuk variabel sektor industri adalah 0,502692 lebih kecil dari t_{tabel} 2,01063 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sektor industri tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara simultan variabel penerimaan pajak dan sektor industri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dibuktikan melalui uji F diperoleh F_{hitung} sebesar 34,41625 nilai ini lebih besar dari F_{tabel} 4,04.

Uji koefisien determinasi diperoleh sebesar 0,851545, angka ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak, sektor industri dan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 85,15

persen, sedangkan sisanya sebesar 14,85 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

1. Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2007-2016.

Dari hasil regresi diperoleh bahwa penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat dari nilai slop variabel ini adalah 0,708777, angka ini menunjukkan pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,708777. Berpengaruh signifikan dilihat dari nilai t_{hitung} 6,773951 lebih besar dari t_{tabel} 2,01063.

Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Samuelson dan Suhrman, dimana Samuelson berpendapat bahwa penetapan pajak dalam jumlah tertentu mampu mempengaruhi belanja konsumsi yang lebih rendah sehingga akan menurunkan GDP (*Gross Domestic Product*), dengan asumsi investasi dan belanja pemerintah tetap, hal ini membuktikan dengan adanya investasi dan pengeluaran pemerintah penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, contohnya investasi yang dilihat dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Sumatera Utara mencapai 5,300,87.368 (Juta Rupiah) pada tahun 2014 dan pengeluaran pemerintah dalam pembelian barang dan jasa, pembangunan jalan, pengeluaran sektor pendidikan, kesehatan, dll mencapai 8,525,300 (Juta

Rupiah) pada tahun 2014, yang akan menghasilkan pendapatan tambahan bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Suherman juga berpendapat bahwa pertambahan pajak akan mengurangi GNP, artinya terdapat hubungan negatif antara pajak dan GNP, tetapi apabila besarnya penerimaan pemerintah melalui pajak yang diikuti oleh pengeluaran pemerintah sebesar pajak tersebut maka GNP akan bertambah sebesar itu pula, ini membuktikan bahwa penerimaan pajak yang diperoleh dan diimbangi dengan pengeluaran pemerintah akan menstabilkan GNP. Penerimaan pajak yang diperoleh pada tahun 2014 adalah 2,050,583,195 (Ribu Rupiah) dan pengeluaran pemerintah pada tahun yang sama adalah 8,525,300 (Juta Rupiah) .

2. Pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2007-2016.

Dari hasil regresi diperoleh bahwa sektor industri berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara, dapat dilihat dari nilai slop variabel ini adalah 0,055306, angka ini menunjukkan pengaruh sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,055306. Berpengaruh tidak signifikan dilihat dari nilai $t_{hitung} 0,502692$ lebih kecil dari $t_{tabel} 2.01063$.

Hal ini menunjukkan ketidak sesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Mudrajat kuncoro dimana ia mengemukakan bahwa proses pembangunan seringkali dikaitkan dengan proses industrialisasi.

Proses industrialisasi dan pembangunan industri merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuznets dan Chenery pada bab II, juga menyimpulkan bahwa negara yang maju cenderung dipengaruhi oleh sektori industri yang maju pula, yang mampu memberikan kontribusi utama terhadap produksi nasional.

Ketidaksesuaian ini didukung oleh penelitian terdahulu Jasman Saripuddin Hasibuan, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa “Produksi sektor industri kota Medan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetapi kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan mengalami penurunan, dikarenakan semakin besarnya sektor-sektor lain yang memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB dan dikarenakan potensi ekonomi kota Medan adalah pada sektor perdagangan, sektor angkutan dan komunikasi dan di Sumatera Utara Sektor Pertanian masih berada di peringkat pertama dalam sumbangannya terhadap PDRB.”

3. Pengaruh variabel *dummy* terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Sumatera Utara tahun 2007-2016.

Variabel *dummy* dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 dari hasil regresi diperoleh bahwa variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lima kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,

dapat dilihat dari nilai slop variabel ini adalah $-0,237902$, angka ini menunjukkan pengaruh variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,237902$. Berpengaruh tidak signifikan dilihat dari nilai t_{itung} diperoleh $-1,077076 <$ dari t_{tabel} 2.01063 .

Sejarah awal mula terjadinya krisis ekonomi tahun 2008 yang dimulai dari krisis ekonomi Amerika Serikat yang merambat ke berbagai negara. Menurunnya daya beli masyarakat Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai konsumen terbesar atas produk-produk dari berbagai negara di seluruh dunia tersebut menyebabkan volume impor menurun dan ekspor dari berbagai negara ikut menurun.

D. Keterbatasan penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sesuai dengan panduan yang diberikan oleh Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan dan disusun sedemikian rupa agar hasil yang diperoleh sebaik mungkin. Namun dalam prosesnya, untuk mendapatkan hasil yang sempurna sangatlah sulit, sebab dalam pelaksanaan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan. Diantara keterbatasan dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Keterbatasa variabel sektor industri yang menunjukkan ketidak sesuaian dengan hipotesis peneliti, dimana dalam penelitian ini secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara.

2. Keterbatasan bahan materi dari skripsi ini, seperti kurangnya referensi yang menjelaskan lebih detail tentang variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini.
3. Keterbatasan dalam data yang diperoleh oleh peneliti, yang mana peneliti hanya memperoleh data selama sepuluh tahun.
4. Keterbatasan dalam penggunaan variabel independen, yang hanya menggunakan dua variabel independen yaitu penerimaan pajak dan sektor industri.
5. Keterbatasan waktu, tenaga dan dana yang dimiliki sehingga begitu banyak waktu yang terulur dalam menyelesaikan penelitian ini.

Walaupun demikian, peneliti berusaha sekuat tenaga agar keterbatasan yang dihadapi tidak mengurangi makna penelitian. Segala upaya, kerja keras, dan bantuan semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti berharap untuk penelitian selanjutnya bisa lebih sempurna.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan tentang “Pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara”. Kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Variabel penerimaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh penerimaan pajak dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,70877 dan $t_{hitung} 6,773951 > t_{tabel} 2,01063$.
2. Variabel sektor industri berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh sektor industri dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar 0,055306 dan $t_{hitung} 0,502692 < t_{tabel} 2,01063$.
3. Variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Pengaruh variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) dapat dilihat dari nilai koefisien sebesar -0,237902 dan $t_{hitung} -1,077076 < t_{tabel} 2,01063$.
4. Secara simultan, diperoleh nilai $F_{hitung} 34,41625 > F_{tabel} 4,04$, menunjukkan penerimaan pajak, sektor industri dan variabel Penerimaan

Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) berpengaruh secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

5. Uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *R-square* sebesar 0,851545. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak, sektor industri dan variabel Penerimaan Pajak sebelum/setelah krisis ekonomi tahun 2008 (*dummy*) mampu menjelaskan variabel pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Utara sebesar 85,15 persen, sedangkan sisanya sebesar 14,85 dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

B. Saran

Pertumbuhan ekonomi adalah tolak ukur keberhasilan ekonomi suatu wilayah dan dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Salah satu *instrument* yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekonomi makro untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi melalui kendali belanja pemerintah dan perpajakan, dan perhatian terhadap sektor industri juga perlu dilakukan karena sektor industri dikenal dengan *leading sector* yang dapat memacu dan mendorong sektor-sektor lain untuk kemajuan ekonomi. Untuk itu, saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara dapat dilakukan dengan penetapan jumlah pajak tertentu harus di imbangi

dengan investasi dan pengeluaran pemerintah terhadap biaya-biaya pembangunan untuk sektor publik yang dapat memacu kemudahan dalam melakukan kegiatan ekonomi, sehingga mampu menciptakan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

2. Pembangunan ekonomi yang sering disebut sebagai proses industrialisasi adalah kondisi membaiknya perekonomian disertai dengan perbaikan sistem kelembagaan, untuk mewujudkan proses industrialisasi tersebut hendaknya pemerintah melakukan investasi diberbagai industri untuk mendorong kinerja produktivitasnya atau melakukan program industrialisasi di daerah yang kurang berkembang yang diyakini sebagai solusi jitu dalam mengejar keterbelakangan.
3. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian terkait judul *“Pengaruh penerimaan pajak dan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara”* menggunakan data *time series* yaitu data runtun waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman azwar karim, *sejara pemikiran ekonomi islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008
- Agus Widarjono, *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2005
- Aprilia Damaningrum, *Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Surakarta*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015
- Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012
- Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: Kencana, 2005
- Didit Purnomo, "Analisis Peran Sektor Industri Terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004," dalam *jurnal Ekonomi Pembangunan*, Volume 9, No. 2, Desember 2008
- Dihan lucky, *Analisis pengaruh variabel penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisas*, Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2011
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahan*, Semarang: Raja Publising, 2011
- Gurajati, Damodar N. *Dasar-dasar ekonometrika jilid ketiga*, Jakarta: Erlangga, 2006
- Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik Ed. Ke tiga*, Yogyakarta: BPFE, 1995
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajawaliPers, 2011
- Hasibuan, Jasman saripuddin *Anallissi kontribusi sektor industri terhadap PDRB kota Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2010
- Henri Faizal Noor, *Ekonomi Publik*, Padang: Akademia permata, 2013
- Jainuddi Zakaria, *Pengantar Toeri Ekonomi Makro Jakarat*: Gaung Persada Pres, 2009

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Buku Panduan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak*, Jakarta: Direktorat Penyuluhan Pelayanan Humas, 2011
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016
- Mankiw, N. Gregory, *Makro Ekonomi*, Terjemahan dari “ Macroeconomic” Oleh Fitria Liza dkk, Jakarta : Erlangga, 2006
- Muhammad Firdaus, *Ekonometrika Suatu Pendekatan Aplikasi*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011
- Mudrajat Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam* Jakarta : Kencana, 2012
- Oktavianita BR Bangun, *Analisis peran sektor industri pengolahan terhadap perekonomian provinsi sumatera utara*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2008
- Pudyatomoko, Y. Sri, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2005
- Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- , *Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Diterjemahkan dari “ Al- Madkhal Li al-fikri Al-Iqtishaad fi al-Islam” Oleh Ahmad Ikhrom, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Samuelson dan Nordhaus, *Ilmu Makro Ekonomi*, Diterjemahkan dari “Macroeconomic” Oleh Gretta dkk, New York: WcGraw-Hill, 2001
- Siahaan, Marihot Pahala, *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Shochrul Ajija, dkk. *Cara cerdas menguasai EvIEWS*, Jakarta: Salemba empat, 2011
- Sudirman, I. Wayan, *Kebijakan Fiskal dan Moneter*, Jakarta : Kencana, 2014
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012

- Suherman rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Sumatera dalam Angka 2014/ Sumatera In Figure 2014, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- Tarigan, Robinson *Ekonomi Regional*, Jakarta: PT Bumi Angkasa, 2005
- Tanjung, Hendri dan Abrista Dewi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2013
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ke Tiga*, Diterjemahkan dari “ Economic Development” oleh Haris Munandar Jakarta: Erlangga, 2003
- Wahyudi Kumorotomo, *Desentralisasi Fiskal*, Jakarta: Kencana, 2008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Ayu Anggita
2. Nama Panggilan : Ayu
3. Tempat/ Tgl. Lahir : Padangsidimpuan/ 06 September 1996
4. Agama : Islam
5. Jenis kelamin : Perempuan
6. Anak ke : 4 (empat) dari 5 (lima) Bersaudara
7. Alamat : Kampung Darek, Kec Padangsidimpuan Selatan
Kota Padangsidimpuan
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. No. Telepon/ HP : 085359480209

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. SD Negeri 200206 Kampung Darek (2002-2008)
2. SMP N 2 Padangsidimpuan (2008-2011)
3. SMK Swasta Kampus Padangsidimpuan (2011-2014)
4. Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Padangsidimpuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (2014-2018)

C. IDENTITAS ORANG TUA

- Nama Ayah : Irwan Ansari Siregar
Pekerjaan : Guru (PNS)
Nama Ibu : Saibah Rumonda Pasaribu
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Lampiran 1

Data Observasi

Data PDRB, Penerimaan Pajak, dan Nilai Tambah Industri di Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Langkat, dan Kota Medan Tahun 2007-2016

Daerah	Tahun	PDRB (Milyar)	Penerimaan Pajak (Milyar)	Nilai Tambah Industri (Milyar)
Asahan	2007	4670,79	11,07	3069,04
Asahan	2008	4905,42	6,27	844,53
Asahan	2009	5134,42	6,90	891,09
Asahan	2010	5389,83	7,10	1157,53
Asahan	2011	13650,24	12,28	1912,58
Asahan	2012	17872,41	13,58	2231,85
Asahan	2013	18892,62	25,78	1198,05
Asahan	2014	20003,08	28,17	2385,57
Asahan	2015	21117,02	31,24	1712,25
Asahan	2016	22308,20	42,93	11113,71
Simalungun	2007	4823,35	10,83	658,27
Simalungun	2008	5049,40	10,93	1135,31
Simalungun	2009	5299,69	11,40	1318,86
Simalungun	2010	5571,10	11,73	1429,55
Simalungun	2011	11627,58	26,89	1877,50
Simalungun	2012	19117,54	51,30	1042,36
Simalungun	2013	20122,01	30,76	1179,17
Simalungun	2014	21194,28	33,13	1906,10
Simalungun	2015	22304,11	80,72	1148,50
Simalungun	2016	23507,97	50,53	4557,42
Deli Serdang	2007	12264,03	55,15	3247,22
Deli Serdang	2008	12977,94	60,85	3645,01
Deli Serdang	2009	13698,06	72,70	3523,43
Deli Serdang	2010	14516,73	78,21	5229,37
Deli Serdang	2011	45125,83	252,08	5905,99
Deli Serdang	2012	47513,87	320,00	6014,50
Deli Serdang	2013	51896,06	364,72	7315,54
Deli Serdang	2014	55790,75	418,68	15373,33
Deli Serdang	2015	58713,67	463,13	5609,47
Deli Serdang	2016	61839,67	487,19	44694,69
Langkat	2007	6178,02	11,74	637,04

Langkat	2008	6491,75	11,89	882,95
Langkat	2009	6819,23	14,30	1038,79
Langkat	2010	7210,56	14,79	1555,39
Langkat	2011	19565,25	18,89	1401,13
Langkat	2012	20858,68	32,09	1356,79
Langkat	2013	22029,48	28,14	1108,89
Langkat	2014	23157,12	37,90	1216,62
Langkat	2015	24321,61	42,12	1679,64
Langkat	2016	25533,81	45,46	7595,70
Medan	2007	29352,92	181,08	9442,48
Medan	2008	31373,95	197,11	9505,93
Medan	2009	33430,05	226,60	9983,86
Medan	2010	35822,22	300,88	6838,72
Medan	2011	93462,49	547,63	10758,26
Medan	2012	105162,00	948,18	15958,21
Medan	2013	110795,42	1190,00	56694,81
Medan	2014	117525,06	1167,40	36411,67
Medan	2015	124269,93	1249,26	20232,54
Medan	2016	132062,86	1316,13	26225,15

Lampiran 2

Output Model Estimasi

1. *Common Effect*

Dependent Variable: PE?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/21/18 Time: 13:59
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	7.780313	0.609696	12.76096	0.0000
PJK?	0.558453	0.085640	6.520963	0.0000
INDSTR?	-0.006953	0.109103	-0.063733	0.9495
R-squared	0.793270	Mean dependent var	9.980000	
Adjusted R-squared	0.784473	S.D. dependent var	1.020004	
S.E. of regression	0.473536	Akaike info criterion	1.400947	
Sum squared resid	10.53911	Schwarz criterion	1.515669	
Log likelihood	-32.02369	Hannan-Quinn criter.	1.444634	
F-statistic	90.17465	Durbin-Watson stat	0.801577	
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. *Fixed Effect*

Dependent Variable: PE?
Method: Pooled Least Squares
Date: 03/21/18 Time: 14:00
Sample: 2007 2016
Included observations: 10
Cross-sections included: 5
Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.565617	0.697155	9.417722	0.0000
PJK?	0.749545	0.097728	7.669698	0.0000
INDSTR?	0.047564	0.109989	0.432443	0.6676
Fixed Effects (Cross)				
_ASAHAN—C	0.449124			
_SIMALUNGUN— C	0.243286			
_DELSERDANG— C	-0.491329			

_LANGKAT—C	0.373088
_MEDAN—C	-0.574169

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.847444	Mean dependent var	9.980000
Adjusted R-squared	0.826157	S.D. dependent var	1.020004
S.E. of regression	0.425285	Akaike info criterion	1.257062
Sum squared resid	7.777288	Schwarz criterion	1.524745
Log likelihood	-24.42654	Hannan-Quinn criter.	1.358997
F-statistic	39.81072	Durbin-Watson stat	1.342277
Prob(F-statistic)	0.000000		

3. *Random Effect*

Dependent Variable: PE?

Method: Pooled Least Squares

Date: 03/21/18 Time: 14:00

Sample: 2007 2016

Included observations: 10

Cross-sections included: 5

Total pool (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.565617	0.697155	9.417722	0.0000
PJK?	0.749545	0.097728	7.669698	0.0000
INDSTR?	0.047564	0.109989	0.432443	0.6676
Fixed Effects (Cross)				
_ASAHAN--C	0.449124			
_SIMALUNGUN-- C	0.243286			
_DELSERDANG-- C	-0.491329			
_LANGKAT--C	0.373088			
_MEDAN—C	-0.574169			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

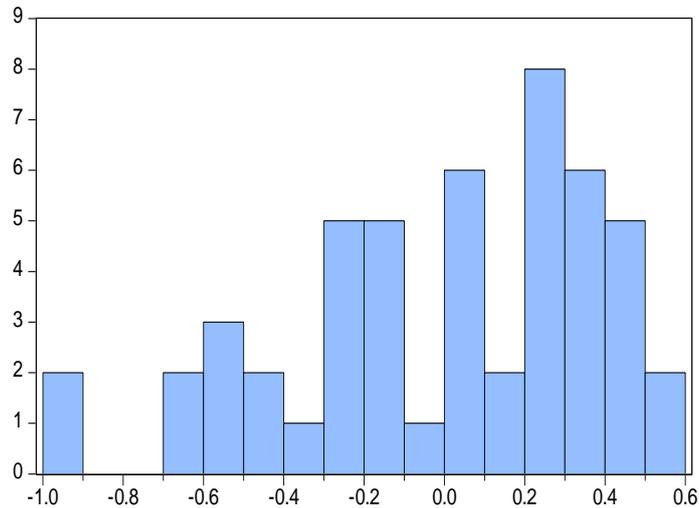
R-squared	0.847444	Mean dependent var	9.980000
Adjusted R-squared	0.826157	S.D. dependent var	1.020004
S.E. of regression	0.425285	Akaike info criterion	1.257062
Sum squared resid	7.777288	Schwarz criterion	1.524745
Log likelihood	-24.42654	Hannan-Quinn criter.	1.358997
F-statistic	39.81072	Durbin-Watson stat	1.342277

Prob(F-statistic) 0.000000

Lampiran 3

Output Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas



Series: Standardized Residuals	
Sample 2007 2016	
Observations 50	
Mean	8.88e-18
Median	0.009188
Maximum	0.587271
Minimum	-0.949769
Std. Dev.	0.393006
Skewness	-0.593122
Kurtosis	2.545848
Jarque-Bera	3.361313
Probability	0.186252

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Park

Dependent Variable: RES2
 Method: Panel Least Squares
 Date: 06/28/18 Time: 14:51
 Sample: 2007 2016
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.334462	0.308974	1.082491	0.2852
PJK	-0.033384	0.045820	-0.728596	0.4703
INDSTR	-0.009548	0.048179	-0.198176	0.8439
DUMMY	0.031235	0.096724	0.322930	0.7484

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.155187	Mean dependent var	0.125186
Adjusted R-squared	0.014385	S.D. dependent var	0.187241
S.E. of regression	0.185890	Akaike info criterion	-0.381678
Sum squared resid	1.451312	Schwarz criterion	-0.075754

Log likelihood	17.54195	Hannan-Quinn criter.	-0.265181
F-statistic	1.102164	Durbin-Watson stat	2.211350
Prob(F-statistic)	0.379562		

3. Uji Multikolinearitas

	D(PJK)	D(INDSTR)	D(DUMMY)
D(PJK)	1.000000	0.153574	-0.092144
D(INDSTR)	0.153574	1.000000	0.060000
D(DUMMY)	-0.092144	0.060000	1.000000

Lampiran 4

Output Uji t, Uji F, dan Uji R²

Dependent Variable: PE
Method: Panel Least Squares
Date: 06/28/18 Time: 15:16
Sample: 2007 2016
Periods included: 10
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	6.691242	0.705568	9.483477	0.0000
PJK	0.708777	0.104633	6.773951	0.0000
INDSTR	0.055306	0.110020	0.502692	0.6178
DUMMY	-0.237902	0.220878	-1.077076	0.2876

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.851545	Mean dependent var	9.980000
Adjusted R-squared	0.826802	S.D. dependent var	1.020004
S.E. of regression	0.424495	Akaike info criterion	1.269815
Sum squared resid	7.568243	Schwarz criterion	1.575739
Log likelihood	-23.74538	Hannan-Quinn criter.	1.386313
F-statistic	34.41625	Durbin-Watson stat	1.380048
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 5

Output Regresi Berganda

Estimation Command:

```
=====  
LS(?, CX=F) PE C PJK INDSTR DUMMY
```

Estimation Equation:

```
=====  
PE = C(1) + C(2)*PJK + C(3)*INDSTR + C(4)*DUMMY + [CX=F,ESTSMPL="2007  
2016"]
```

Forecasting Equation:

```
=====  
PE = C(1) + C(2)*PJK + C(3)*INDSTR + C(4)*DUMMY + [CX=F,ESTSMPL="2007  
2016"]
```

Substituted Coefficients:

```
=====  
PE = 6.6912417297 + 0.708777438597*PJK + 0.0553063618096*INDSTR -  
0.237902395243*DUMMY + [CX=F,ESTSMPL="2007 2016"]
```